

SKRIPSI
***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENGATASI**
KEMISKINAN MENUJU SDGs 2030 DI KOTA MAKASSAR

YULIANA

Nomor Induk Mahasiswa: 105641112119



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM MENGATASI
KEMISKINAN MENUJU SDGs 2030 DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Sebagai salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

YULIANA

Nomor Induk Mahasiswa: 105641112119

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kemiskinan Menuju SDGs 2030 di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Yuliana

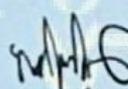
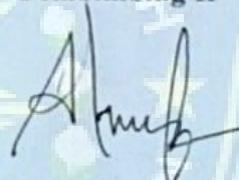
Nomor Induk Mahasiswa : 105641112119

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyetujui

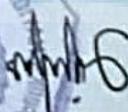
Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. Ahmad Taufik, S.IP., M.AP.

Mengetahui

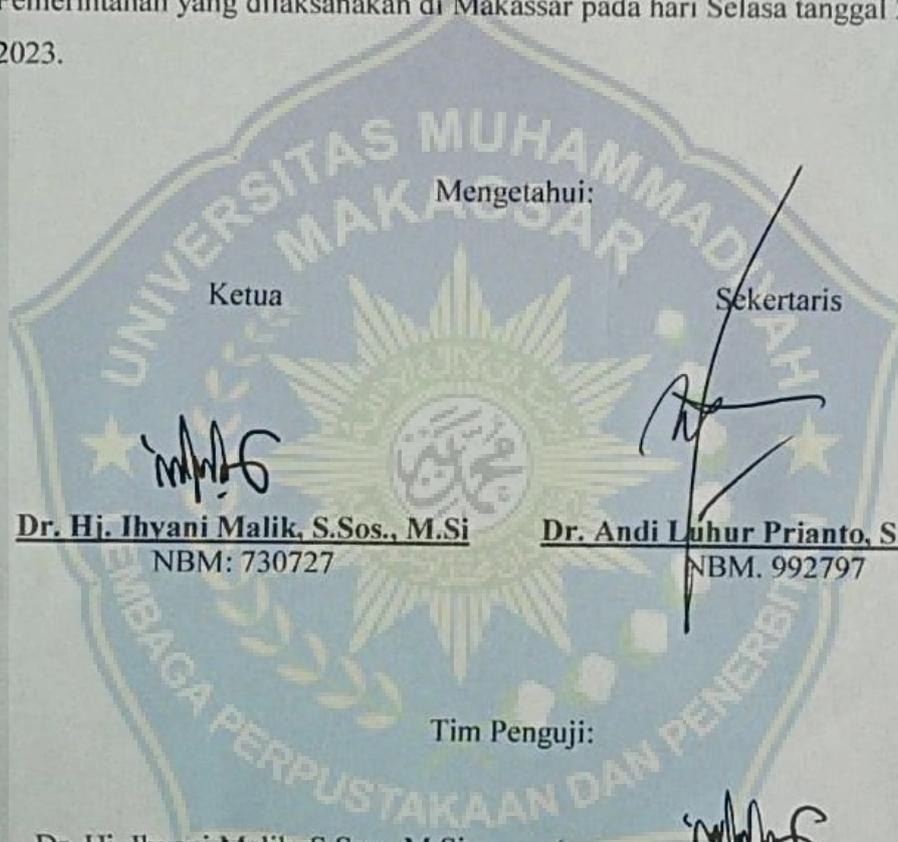
Dekan Ketua Program Studi

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I.
NBM.730.727 NBM. 1207163

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0184/FSP/A.4-II/VIII/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Pemerintahan yang dilaksanakan di Makassar pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023.



Mengetahui:

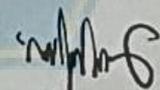
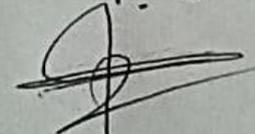
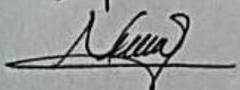
Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si.
NBM. 992797

Tim Penguji:

1. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. ()
2. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si. ()
3. Nurbiah Tahir, S.Sos., M. AP. ()

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Yuliana
Nomor Induk Mahasiswa : 105641112119
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya tulis ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan akademik.

Makassar, 04 Agustus 2023

Yang Menyatakan,



Yuliana

ABSTRAK

Yuliana, 2023. *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kemiskinan Menuju SDGs 2030 di Kota Makassar. (Pembimbing I Ihyani Malik, Pembimbing II Ahmad Taufik).

Permasalahan global dan kompleks yakni kemiskinan sampai saat ini belum memiliki penyelesaian yang tepat. Kemiskinan adalah masalah semua orang dibuktikan dengan posisi kemiskinan yang menempati poin pertama pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Hal ini menyebabkan penyelesaiannya juga butuh banyak orang. Konsep yang melibatkan banyak orang dalam hal ini pihak pemerintah, swasta dan masyarakat adalah konsep *collaborative governance*. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengkaji apakah ada kerja sama yang terjalin antara dinas sosial dan Badan Amil Zakat Nasional dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan kolaboratif adalah tahap pertama, yang melibatkan mengidentifikasi hambatan yang dapat dicapai melalui kerja sama para pemangku kepentingan; proses ini termasuk menentukan kebutuhan pemangku kepentingan dan menerapkan strategi untuk mencapainya. Tahap kedua, pemerintahan kolaboratif adalah mengidentifikasi strategi untuk pengaruh. Tahap ini melibatkan mengevaluasi seberapa efektif strategi tersebut dan seberapa efektif dapat diterapkan. BAZNAS dan dinas sosial dapat melakukan kolaborasi ini melalui database, yang merupakan bagian penting dari sektor sosial untuk mengidentifikasi masyarakat yang hidup dalam kemiskinan agar masyarakat yang mendapatkan bantuan bisa merata dan lebih efektif. Tahap ketiga dari kolaborasi pemerintahan melibatkan perencanaan tindakan kolaborasi antara dinas sosial dan BAZNAS, yang melibatkan menentukan kebutuhan pemangku kepentingan, menerapkan strategi, dan mengevaluasi hasil. Kolaborasi antara BAZNAS dan dinas sosial diharapkan dapat lebih intens lagi dari segi program kerja agar bisa bersama-sama mengatasi kemiskinan di kota Makassar.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Kemiskinan, BAZNAS, Dinas Sosial

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Untaian rasa syukur senantiasa tercurahkan kepada sang pemilik semesta, pemilik hari pembalasan, yang maha kuasa dan yang maha membolak-bolakkan hati manusia. *Allah Subhanawataala* yang selalu memberikan nikmat yang tidak terkira bagi segenap umat manusia. Maka, sudah sepantasnya manusia senantiasa memiliki rasa syukur atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Segala hal yang terjadi pada kehidupan adalah terjadi sesuai kodrat kehendaknya, termasuk pengerjaan dan penyelesaian skripsi ini, adalah bentuk nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanawataala kepada penulis. Meski tidak lepas dari berbagai dinamika yang mewarnai tapi, itulah estetika sebuah kehidupan. Tanpa tantangan apalah arti kehidupan ini. Kita hanya perlu menjalani dan menikmati setiap takdir.

Selawat dan salam sepatutnya senantiasa tercurahkan kepada kekasih Allah Subhanawataala, pemuda padang pasir, manusia yang dalam sakaratul mautnya masih mengingat umatnya. Sang pembela umat islam, yakni baginda Nabi Besar Muhammad *Shallallahu Alaihi Wa Sallam*. Sang penggerak peradaban umat manusia, nabi yang membawa pelita penerang bagi kehidupan manusia. Salam serta selawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, tabiin serta orang-orang yang selalu istiqomah di jalan kebnaran dinul islam.

Skripsi ini disusun dalam rangka penyelesain studi ilmu pemerintahan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis berharap skripsi ini

dapat memiliki manfaat bagi banyak orang. Oleh karena itu, ungkapan rasa terimakasih kepada berbagai pihak yang secara langsung atau tidak langsung memiliki andil dalam penyelesaian ini. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Rasa sayang dan cinta yang besar, terimakasih yang tidak terhingga untuk dua manusia hebat yang membimbing dan mendidik dengan hebatnya. Bapak Hasanuddin dan Ibu Halimatan terimakasih untuk segala hal. Tentang materi, motivasi dan doa yang senantiasa tercurah.
2. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Kepada Bapak Ahmad Harakan, S.IP., M.H.I selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Ibu Nur Khaerah, S.IP., M.IP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Beserta Jajarannya.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Taufik, S.IP., M.AP. selaku Pembimbing II yang telah membantu untuk menyemenganti penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Randhy andalan saya, beliau adalah dosen Penasehat Akademik yang sangat luarbiasa bagi saya. Beliau adalah dosen PKM saya, Alhamdulillah selalu *fast respon* kalau saya hubungi. Beliau juga selalu siap untuk

membimbing dalam membuat proposal PKM. Terimakasih untuk semua ilmunya pak.

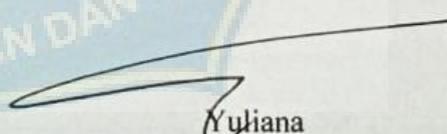
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau pun asisten, serta seluruh Staf Pegawai atau karyawan Tata Usaha di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Terima kasih juga kepada seluruh staf di Dinas Sosial Kota Makassar yang telah menerima peneliti dengan ramah, begitu pula untuk seluruh staf Baznas Kota Makassar.
8. Terima kasih juga kepada teman kelas IPD angkatan 2019 yang tetap ramah dan menjadi teman yang bisa diandalkan selama menjalani perkuliahan ini.
9. Teruntuk manusia random yang memenuhi warna perkuliahan saya, manusia Gemilang 24. Penghuni rumah kuning, menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi rumah yang selalu menyenangkan. Mood boosterku dan motivator paling terbaik.
10. *Special thanks* untuk Kabid ku Nurfadillah yang sabar menghadapi isi otak saya yang random. Terimakasih untuk kesiap siagaannya membonceng diriku. Teruntuk Nuramanah yang menemani saya antar surat penelitian, menemani saya ke lokasi penelitian. Teruntuk bendum ku tersayang Sukma Nurmaula yang selalu optimis dalam segala hal. Terimakasih selalu menampung manusia beban ini di kostmu.



11. Terimakasih kakak-kakak Petang 29 dan Kakak 36 Beraksi yang memberikan banyak ilmu selama berproses. Menjadi kakak yang melatih mental dan memberikan banyak *skill* baru.
12. Terimakasih untuk adik-adik 21 Penjelajah Ilmiah dan Glorious 17 untuk pelajaran yang indah dan perjalanan bermaknanya saat saya menjadi penanggung jawab Diklat.
13. Terimakasih untuk akhwat Pondok An-Nadhiroh selalu bisa menjadi tempat pulang. Selalu menjadi pengingat di kala futur.
14. Terimakasih untuk Visca, Iksan dan Andi Wiwik yang siap kurepotkan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala dinamika, tantangan antara akademik dan amanah yang diemban di bahu, skripsi bisa diselesaikan oleh penulis. Semoga menjadi manfaat bagi setiap manusia dan mendapat berkah di sisi *Allah Subhanawataala*.

Makassar, 04 Agustus 2023



Yuliana

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENERIMAAN TIM	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. <i>Collaborative Governance</i>	13
C. <i>Sustainable Development Goals 2030</i>	16
D. Kerangka Pikir.....	20
E. Fokus Penelitian	20
F. Deskripsi Fokus Penelitian	21
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	23

B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	23
C. Data dan Sumber Data.....	23
D. Informan Penelitian	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data	26
G. Keabsahan Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
B. Indikator Kemiskinan.....	46
C. Hasil Penelitian.....	48
D. Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
E. Matriks Hasil Temuan Penelitian.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN.....	93
RIWAYAT HIDUP	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	25
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin.....	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar.....	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	20
Gambar 4.1 Halaman Depan Dinas Sosial Kota Makassar.....	30
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar.....	31
Gambar 4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar.....	44
Gambar 4.4 Potret rumah masyarakat di Kecamatan Tamalate.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memberikan kesejahteraan kepada warganya adalah tujuan sebuah negara. Pemerintah harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bersifat nasional; itu selalu berubah seiring perkembangan dunia (Suratno, 2017). Oleh karena itu, pemerintah harus membangun suasana pemerintahan yang kolaboratif untuk membangun Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah yang kolaboratif dan memiliki misi yang sama akan mewujudkan Indonesia yang berkemajuan. Salah satunya yaitu dengan menerapkan konsep *Collaborative Governance*. Pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentu. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran.

Collaborative Governance merupakan pengembangan dari konsep *Governance* yang bertujuan pada ketercapaian tujuan serta efektifitas pembangunan. *Collaborative Governance* didefinisikan oleh Ansell dan Gash (2007:544) sebagai sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung agar terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal,

berorientasi pada konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kolaborasi berarti bahwa semua pihak yang terlibat atau terlibat memiliki tanggung jawab yang sama atas keputusan yang diambil. Akibatnya, semua pihak yang terlibat harus duduk satu meja dan memiliki kekuatan yang sama untuk membuat keputusan. Penggunaan konsep kolaboratif sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama adalah kepemimpinan yang kuat, yang memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur kegiatan yang kompleks ini. Kedua, agar mekanisme berjalan dengan seimbang sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing, mediator harus bertindak secara netral. Ketiga, karena organisasi pemerintah memiliki otoritas yang lebih besar dibandingkan organisasi lain, kolaborasi akan berhasil ketika birokrasi bertindak sebagai pengendali. Keempat, karena ketidakseimbangan sumber daya dan kekuasaan, negosiasi adalah tahap penting dalam proses kolaborasi. Kelima, otoritas tidak menghasilkan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan dan saling menghormati (Aeni & Astuti, 2019).

Collaborative Governance dimaksudkan memperkuat kerjasama dan koordinasi dalam hal ini kepala pemerintahan beserta semua jajaran terkait termasuk seluruh kepala pemerintah daerah dan para ahli lintas sektor. Perkembangan dari kolaborasi ini dapat secara faktual disampaikan kepada masyarakat sehingga informasi yang diperoleh dapat dipahami baik oleh publik

(Cahyono, 2021). Untuk menjalankan pemerintahan yang bekerja sama, pemerintah, swasta, dan masyarakat membutuhkan sikap saling memahami. Diharapkan bahwa semua pihak memahami masalah, kebutuhan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam konteks ini, sehingga kebijakan dan keputusan yang dibuat dapat semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan dan keinginan pihak-pihak terkait (Hadilinatih, 2019).

Agrawal dan Lemos (Subarsono, 2011) mendefinisikan *collaborative governance* tidak hanya terbatas pada pemangku kepentingan yang terdiri dari pemerintah dan non-pemerintah tetapi juga terbentuk atas adanya “*multi-partner governance*” yang meliputi sektor privat/ swasta, masyarakat dan komunitas sipil dan terbangun atas sinergi peran pemangku kepentingan dan penyusunan rencana yang bersifat “*hybrid*” seperti halnya kerja sama publik-privat-sosial.

Konsep *Collaborative Governance* hadir dengan mengandalkan kerja sama di setiap sektor bukan hanya pemerintah saja namun juga membutuhkan partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil. Kolaborasi Tentunya akan lebih sempurna jika didukung oleh kontribusi para pemuda Indonesia yang dalam *Collaborative Governance* memiliki peran sebagai masyarakat sipil. Kolaborasi tiga elemen inilah yang menjadi fokus dan keberhasilan dari konsep *Collaborative Governance*.

Permasalahan di Indonesia terjadi di beberapa sektor pemerintahan termasuk pada sektor perekonomian negara. Masalah yang memiliki urgensi untuk diselesaikan sejak dahulu adanya bangsa Indonesia adalah masalah

kemiskinan. Selalu menjadi *headline* dan dikeluhkan masyarakat sering mengalami kontroversi kebijakan dengan masyarakat. Kemiskinan adalah masalah pembangunan yang dapat terjadi di mana saja, baik di negara maju maupun berkembang. Kemiskinan, yang merupakan salah satu masalah utama perekonomian Indonesia sebagai negara berkembang, tampak seperti "pekerjaan rumah" yang tidak dapat diselesaikan. Sebenarnya, pemerintah telah melakukan banyak hal untuk mengatasi kemiskinan, mulai dari program bantuan modal atau uang tunai kepada orang miskin hingga program transmigrasi.

Selama pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin kembali meningkat. Pada semester II-2020 penduduk miskin tercatat di angka 10,19 persen. Persentase yang sama (di atas 10 persen) terakhir dicapai tahun 2017. Sehubungan dengan itu, rasio gini juga diperkirakan meningkat seiring dengan ketimpangan yang terjadi selama masa pandemi Covid-19. Pandemi menyebabkan kelompok rentan lebih banyak kehilangan pekerjaan dan masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Sebenarnya, Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya dan dapat menikmati kekayaan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dibuktikan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh Sumber Daya Alam vital yang dimiliki adalah seluruhnya dimiliki dan dikelola oleh negara demi kepentingan dan juga kemakmuran rakyat Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 tersebut, kemiskinan merupakan sebuah masalah serius yang dipengaruhi oleh beberapa hal yang berkaitan satu sama lain. Hal itu diantaranya seperti tingkat pendidikan, pendapatan masyarakat, pengangguran, geografis, karakter, budaya, dan juga lainnya. Kemiskinan bukan hanya bisa ditemukan di daerah pedesaan, namun di perkotaan kemiskinan dapat dengan mudah ditemukan. Kemiskinan merupakan sebuah hal yang sudah ada sejak zaman sebelum reformasi Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintahan di negara yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diupayakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan walaupun hasil yang didapatkan belum terlalu seperti yang diharapkan.

Kota Makassar juga tidak luput dari masalah kemiskinan yang menjerat, BPS mencatat jumlah penduduk miskin kota Makassar 71,83 ribu jiwa pada tahun 2022 (BPS, 2022). Angka kemiskinan kota Makassar juga tertinggi kedua di Sulawesi Selatan pada tahun-tahun sebelumnya: 69,98 ribu jiwa tahun 2020, 74,69 ribu jiwa pada tahun 2021.

Untuk mengatasi kemiskinan di Kota Makassar, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil harus bekerja sama. Sampai hari ini, kemiskinan tetap menjadi masalah global. Untuk menanggapi, 189 negara setuju untuk deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs) pada pertemuan September 2015. Salah satu tujuan adalah menurunkan jumlah orang miskin hingga 50% pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih

merupakan masalah besar yang perlu ditangani secara kolektif (Ishartono et al., 2017).

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kemiskinan Menuju SDGs 2030 di Kota Makassar. Penelitian ini akan mengkaji terkait bentuk kerja sama antara pemerintah dan swasta di Kota Makassar sebagai wujud pemerintahan yang kolaboratif menujud SDGs 2030. Masalah kemiskinan yang terjadi menjadi salah satu poin dari *Sustainable development Goals* 2030 tepatnya pada poin pertama mengatasi kemiskinann. Oleh karena itu, agar tujuan SDGs 2030 bisa tercapai di tengah perkembangan teknologi serta peran dari berbagai sektor pemerintah dalam mengatasi kemiskinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dibuatlah rumusan masalah yaitu Bagaimana *Collaborative Governance* di Kota Makassar dalam mengatasi kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk *Collaborative Governance* di Kota Makassar dalam mengatasi Kemiskinan Menuju SDGs 2030 di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukannya penelitian ini, terbagi atas 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman terkait pentingnya sebuah kolaborasi dalam membangun sebuah Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi peneliti, yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah yang dihadapi secara nyata.
- b. Hasil penelitian diharapkan bisa digunakan sebagai sumber informasi dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dalam bersama-sama mengatasi permasalahan kemiskinan di era SDGs 2030.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan konsep *Collaborative Governance* dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, penelitian terdahulu terkait penelitian ini serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Chotimah et al., 2022) Model <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Lingkungan Maritim di Kepulauan Seribu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi terdiri dari adanya dialog, membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi, adanya komitmen terhadap proses kolaborasi yang akan dijalin, adanya pemahaman yang sama terkait tujuan yang ingin dicapai dan hasil antara dari kolaborasi yang dilakukan antar aktor dalam pengelolaan	Persamaan penelitian Chotimah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait bagaimana implementasi dari <i>Collaborative Governance</i> dalam memecahkan sebuah permasalahan.	Perbedaannya adalah penelitian Chotimah objek kajiannya adalah pengelolaan sampah plastik, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait peran <i>Collaborative Governance</i> dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Jika dalam penelitian chotimah menekankan pada dialog,

		sampah plastik laut.		berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada 3 indikator untuk mewujudkan <i>collaborative governance</i> .
2.	(Faidati & Muthmainnah, 2019) <i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri	Kolaborasi yang terbentuk dalam konteks ini diwujudkan dengan penyelenggaraan sejumlah kegiatan dari masing-masing stakeholder. <i>Collaborative Governance</i> Proses dalam pengembangan UMKM di DIY pada era revolusi industri 4.0 belum optimal dilaksanakan, karena masih ada tumpang tindih program serta kelompok sasaran.	Persamaan penelitian Faidati dan Muthmainnah dengan penelitian yang akan dilakukan adalah mengkaji terkait bagaimana implementasi dari <i>Collaborative Governance</i> dalam memecahkan sebuah permasalahan.	Perbedaannya adalah penelitian Faidati dan Muthmainnah objek kajiannya adalah Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri, sedangkan penelitian ini mengkaji terkait peran <i>Collaborative Governance</i> dalam mengatasi kemiskinan. Penelitian ini juga melibatkan masyarakat dalam upaya <i>collaborative governance</i> untuk mengatasi kemiskinan.
3.	(Salsabila & Sadayi, 2022) <i>Collaborative Governance</i> dalam	Konsep tata kelola kolaboratif dilaksanakan dalam	Persamaan antara penelitian Sadiya dan Salsabila dengan penelitian ini	Perbedaan antara penelitian Sadiya dan Salsabila

	<p>Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Kabupaten Kulon Progo menerapkan konsep tata kelola kolaboratif atau <i>Collaborative Governance Regime (CGR)</i> dalam menjalankan paradigma pembangunan alternatif. Aktor yang terlibat dalam menjalankan CGR terdiri dari <i>State Actors</i> dan <i>Non-state Actors</i>. <i>State actors</i> terdiri dari lembaga pemerintah baik dari pusat maupun daerah, sedangkan <i>non-state actors</i> terdiri dari pihak swasta, LSM, dan masyarakat. Aktor-aktor yang terlibat saling bekerjasama secara aktif dan interaktif dalam menjalankan CGR dalam mengimplementasikan program</p>	<p>adalah terletak pada permasalahan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo yang dikaji dengan konsep <i>Collaborative Governance</i>.</p>	<p>dengan penelitian ini adalah penelitian Sadiya dan Salsabila hanya membahas <i>Collaborative Governance</i> sedangkan pada penelitian ini juga membahas mengenai SDGs 2030 sebagai sebuah salah satu indikator capaian dalam melakukan penelitian.</p>
--	--	--	---	---

		<p>sehingga menghasilkan <i>collaborative actions</i>. Hasil dari <i>collaborative actions</i> memberikan <i>outcome</i> dalam membentuk ketahanan sosial masyarakat melalui pemberdayaan sehingga mandiri secara ekonomi.</p>		
4.	<p>(Mulyani et al., 2021) Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal, perusahaan swasta, dan masyarakat umum sangat terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata. Sementara itu, pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan ekowisata harus lebih terlibat dan responsif. Responnya masih lambat dan menunggu destinasi mandiri yang dibuat masyarakat. Oleh karena itu,</p>	<p>Persamaan antara penelitian Mulyani et al, dengan penelitian ini adalah konsep <i>collaborative governance</i> yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji pengelolaan dan pengembangan ekowisata.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian Mulyani et al dengan penelitian ini adalah penelitian Mulyani et al hanya membahas <i>Collaborative Governance</i> sedangkan pada penelitian ini juga membahas mengenai SDGs 2030 sebagai sebuah salah satu indikator capaian dalam melakukan penelitian.</p>

		<p>untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam ekowisata yang efisien di masa depan, pemerintah daerah, bisnis swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama.</p>		
5.	<p>(Megawati et al., 2020) Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development</p>	<p>Dalam situasi darurat pandemi COVID-19, tidak hanya pemerintah yang harus bekerja sama dan bekerja sama; semua pemangku kepentingan juga harus duduk bersama dalam satu forum untuk membangun kesepahaman dan komitmen. Forum juga harus memiliki rasa tanggung jawab atas tata kelola kolaborasi untuk mempercepat penanganan COVID-19 di pusat dan daerah. Keterlibatan warga berarti bahwa orang-orang terlibat</p>	<p>Persamaan antara penelitian Megawati et al, dengan penelitian ini adalah terletak pada penerapan konsep <i>Collaborative Governance</i> dalam melakukan proses percepatan dalam penanganan covid 19.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian Megawati et al dengan penelitian ini adalah penelitian Megawati et al hanya terfokus pada konsep <i>Collaborative Governance</i> sedangkan pada penelitian ini juga membahas mengenai SDGs 2030 sebagai sebuah salah satu capaian yang ingin dicapai dalam penelitian ini.</p>

		<p>dalam urusan publik dengan tujuan membangun hubungan yang dapat diandalkan di luar hanya bertukar informasi. Pemerintah yang mengambil pendekatan holistik untuk keterlibatan warga meningkatkan partisipasi publik dalam kegiatan politik seperti diskusi kebijakan publik, meningkatkan pemahaman, dan mendorong pengambilan keputusan yang transparan.</p>		
--	--	--	--	--

B. Collaborative Governance

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada berbagai jenis kerja sama antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah juga bertindak sebagai upaya dan respons atas kegiatan penanganan masalah publik. Istilah "kerja sama antar pemangku kepentingan" dapat didefinisikan sebagai *Collaborative Governance* (Irawan, 2017). *Collaborative Governance* didefinisikan sebagai sebuah keseimbangan sumber daya dan kewenangan antara pihak yang memiliki kepentingan dan intervensi terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan, yang menghasilkan sifat

ketergantungan dalam penyelesaian masalah melalui keputusan kolektif dan persetujuan bersama (Islamy, 2018). *Collaborative Governance* adalah sebuah proses dan struktur yang melibatkan banyak aktor/para pihak tidak terbatas dalam organisasinya bahkan melintasi batas-batas organisasinya. Kolaborasi dijalankan untuk menggambarkan bentuk kerjasama yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik. Nilai-nilai dasar dalam *Collaborative Governance* menjadi kesatuan yang terintegrasi dan melingkupi setiap tahapan kebijakan publik dalam konteks kajian administrasi public (Dewi, 2019).

Definisi dari Ansell dan Gash menekankan enam kriteria. Pertama, forum tersebut diinisiasi oleh institusi publik. Kedua, partisipan dalam forum tersebut harus mencakup aktor nonpemerintah. Ketiga, partisipan harus terlibat secara langsung dalam pembuatan kebijakan dan tidak sekedar “berkonsultasi” dengan pihak pemerintah. Keempat, forum harus terorganisasi secara formal dan ada pertemuan secara rutin. Kelima, kebijakan yang diambil harus berdasarkan konsensus. Keenam, kolaborasi berfokus pada kebijakan publik atau manajemen publik (Ansell & Gash, 2008). *Collaborative Governance* merupakan instrumen yang digunakan untuk mengatasi suatu masalah. *Collaborative Governance* merupakan instrumen yang tepat untuk berkonfrontasi dengan masalah, sebab *Collaborative Governance* menciptakan “kepemilikan bersama” terhadap masalah tersebut. Berbagai aktor memiliki perspektif yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Bukan hal yang mudah untuk menciptakan suatu kepehaman di antara peran aktor tersebut.

Collaborative Governance berperan sebagai penengah agar para aktor dapat merumuskan kesepakatan yang sama terhadap suatu masalah (Ansell, 2014: 172).

Selain itu, terdapat pendapat lain terkait definisi *Collaborative Governance*. *Collaborative Governance* adalah konfigurasi dinamis dari dinamika kolaborasi yang merespons konteks dan *driver* sistem, dan menghasilkan tindakan, hasil, dan adaptasi. Sedangkan dinamika kolaboratif yang terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi yaitu: berprinsip keterlibatan, motivasi bersama dan kapasitas aksi bersama untuk menggerakkan (Emerson dan Nabatchi dalam Avoyan et.al, 2017). Salah satu faktor keberhasilan *Collaborative Governance* adalah masing-masing aktor yang terlibat merupakan pihak yang berkepentingan dalam kolaborasi sehingga tindakan yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan kolaborasi. Selain itu, faktor pemimpin kolaborasi sangat penting dalam mengarahkan dan menentukan keberhasilan *Collaborative Governance*.

Pemahaman terkait *Collaborative Governance* lebih jelas lagi dapat diwujudkan melalui berbagai fase yang menjadi sebuah proses pada *Collaborative Governance*. Terdapat tiga fokus fase atau tiga tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam mewujudkan konsep *Collaborative Governance* (Ratner et al., 2012) yaitu.

1. Identifikasi Hambatan (*Identifying Obstacles*) fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini, para pemangku kepentingan yang bekerja sama mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama

proses kerja sama. Setiap pemangku kepentingan berbagi informasi tentang masalahnya, dan pemangku kepentingan lain mendengarkan apa yang disampaikan oleh masing-masing pemangku kepentingan. Kemudian pertimbangkan kemungkinan untuk menyelesaikan setiap masalah yang telah diidentifikasi, termasuk mencari solusi untuk masalah yang akan datang. Setiap pemangku kepentingan memiliki kewenangan yang sama dalam menentukan kebijakan pada setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dan memperhitungkan peluang berupa *achievement* yang dapat diperoleh dari masing-masing pihak.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog. Salah satu hal yang dibicarakan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat adalah tentang cara terbaik untuk memecahkan masalah. Kemudian mereka berbicara tentang pihak-pihak yang dapat mendukung penyelesaian masalah dalam kolaborasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*), pada

tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan.

C. Sustainable Development Goals 2030

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mengurangi jumlah penduduk miskin adalah tujuan utama pembangunan. Masyarakat miskin

biasanya tidak memiliki kemampuan untuk berusaha dan memiliki akses yang terbatas ke kegiatan sosial-ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, membuat mereka tertinggal dari kelompok masyarakat lain yang memiliki potensi kehidupan yang lebih baik. Ini adalah masalah utama pembangunan bagi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota (Ginanjari et al., 2018).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, atau SDGs) adalah rencana global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrem, mengurangi ketidaksetaraan, dan melindungi Bumi pada tahun 2030. SDGs merupakan komponen penting dari agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, yang bertujuan untuk mewujudkan masa depan yang lebih berkelanjutan. Agenda ini bertujuan untuk memerangi masalah global seperti kemiskinan, ketimpangan, keadilan, iklim, dan degradasi lingkungan.

SDGs memberikan panduan global untuk mengatasi tantangan global yang dihadapi masyarakat internasional. Ini melindungi kehidupan dan fondasi alami planet kita dengan lebih baik, dimana pun dan untuk semua, dan mempertahankan kesempatan bagi orang-orang untuk hidup bermartabat dan sejahtera dari generasi ke generasi. Ke-17 tujuan tersebut mencakup ketiga bidang pembangunan berkelanjutan: ekologi, ekonomi dan sosial. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) ditujukan untuk politik, masyarakat sipil, bisnis, ilmu pengetahuan, dan semua individu (Prabu Aji & Kartono, 2022).

Setelah era MGDs yang sudah berakhir pada tahun 2015, kini telah disusun dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan tujuan-tujuan yang belum sempat tercapai sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat. Sebab itu, pembangunan pasca tahun 2015 mulai disusun dengan mengatasi hambatan-hambatan untuk memajukan pembangunan termasuk soal kemiskinan (Nawir et al, 2022). SDGs 2030 diharapkan dapat berkontribusi terhadap umat manusia dan yang terpenting adalah memperkuat perdamaian bagi semua masyarakat internasional dalam kebebasan yang luas dan dapat diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dalam tantangan global saat ini dan merupakan prasyarat yang tidak dapat dilanjutkan untuk pembangunan berkelanjutan (Setiawan et al., 2021).

Melihat dari tujuan SDGs itu maka ada 17 sasaran yang perlu dicapai dari program SDGs yaitu: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*No Poverty*), Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan (*Zero Hunger*), Menjamin hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua usia (*Good Healt and Well Being*), Memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup (*Quality Education*), Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan (*Gender Equality*), Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua (*Clean Water and Sanitation*), Memastikan akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan,

dan modern untuk semua (*Affordable and Clean Energy*), Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan keberlanjutan lapangan kerja penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua (*Decent Work and Economic Growth*) (Gazzola et al., 2020).

Berdasarkan SDGs 2030, kemiskinan adalah poin pertama, yang menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah penting yang harus diselesaikan. Kemiskinan umumnya didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya dengan baik dihadapkan pada orang-orang yang hidup bebas, malas bekerja. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, seperti pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan akses ke barang dan jasa. Lokasi, gender, dan lingkungan (Kasna, 2020).

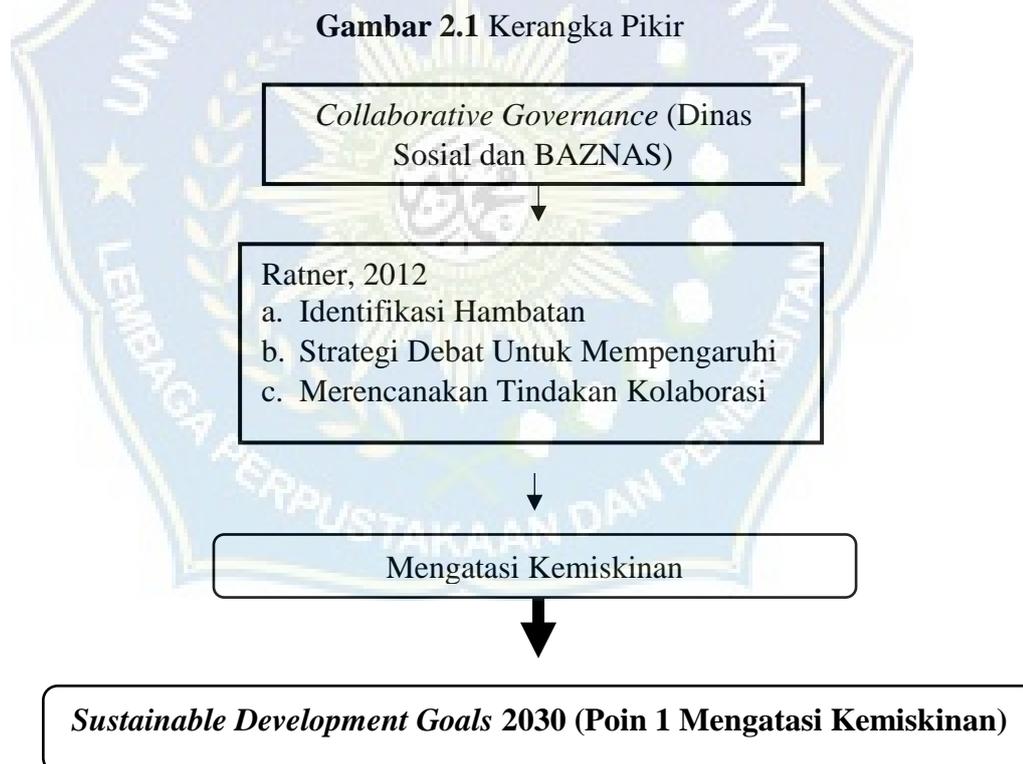
Tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa ada perbedaan tingkat kemiskinan di berbagai daerah. Semakin banyak provinsi di Indonesia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, semakin tinggi tingkat nasionalnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia harus dilakukan mulai dari tingkat bawah. Artinya mengurangi tingkat kemiskinan harus dimulai dari masing-masing daerah. Agar hal ini dapat berjalan efektif maka diperlukan peran signifikan dari masing-masing kepala daerah dan jajarannya (Rasbin, 2018). Kemiskinan telah menjadi masalah umum. Berita tentang kemiskinan selalu menjadi perhatian publik. Jika masalah seperti kemiskinan masih belum teratasi meskipun banyak kebijakan atau bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah,

tentunya menimbulkan pertanyaan besar tentang apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan berbagai konsep dari teori yang digunakan dalam penelitian serta hubungannya dengan perumusan masalah. Mengacu pada teori *Collaborative Governance* yang merupakan sebuah konsep kolaboratif dalam sistem pemerintahan.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



E. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir yang telah disusun oleh peneliti maka yang menjadi fokus penelitian yaitu: penerapan konsep *Collaborative Governance* yang diwujudkan dalam tiga fase yaitu Identifikasi Hambatan (*Identifying*

Obstacles), Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*) dan Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*) yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan swasta. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran sehingga setidaknya ada langkah yang dilakukan dalam mewujudkan poin 1 SDGs 2030 yaitu mengatasi kemiskinan.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Sebuah kolaborasi terbangun dengan adanya suatu indikator yang ingin dicapai. Termasuk dalam penerapan konsep *Collaborative Governance* yang melibatkan tiga unsur penting yaitu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Mewujudkan *Collaborative Governance* dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Makassar harus melalui beberapa fase yaitu.

1. Identifikasi Hambatan (*Identifying Obstacles*) fase pertama ini adalah fase mendengarkan. Pada tahap ini para pemangku kepentingan yang melakukan kolaborasi melakukan identifikasi mengenai berbagai jenis hambatan yang akan dihadapi selama proses kolaboratif. Pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar adalah Dinas Sosial sebagai pemerintah, Baznas sebagai pihak swasta. Keduanya akan menerangkan mengenai permasalahan yang ada Kemudian memperhitungkan mengenai peluang dalam penyelesaian setiap permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti solusi dari permasalahan yang akan terjadi. Pada dasarnya, fase ini merupakan fase saling mendengarkan mengenai permasalahan dan kesempatan untuk dapat

memanfaatkan dari setiap permasalahan yang diterangkan oleh masing-masing pemangku kepentingan termasuk masyarakat.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini adalah fase dialog, pihak Dinas Sosial selaku pemerintah, Baznas sebagai pihak swasta dan masyarakat melakukan dialog ataupun diskusi mengenai hambatan yang telah diterangkan pada fase pertama. Diskusi yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat meliputi diskusi mengenai langkah yang dipilih sebagai langkah yang paling efektif untuk memecahkan permasalahan. Kemudian mendiskusikan mengenai pihak-pihak yang mampu mendukung penyelesaian permasalahan dalam kolaborasi yang telah diterangkan.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Setelah melalui tahap mendengarkan mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam proses kolaborasi dan melakukan diskusi mengenai penentuan strategi yang efektif untuk mengantisipasi permasalahan, pada tahap ini pemangku kepentingan yang terlibat akan mulai melakukan perencanaan mengenai implementasi dari setiap strategi yang telah didiskusikan pada tahap sebelumnya, seperti langkah awal yang akan dilakukan dalam proses kolaborasi antar pemangku kepentingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada saat selesai seminar proposal. Lokasi penelitian bertempat di Kota Makassar tepatnya pada Dinas Sosial dan Baznas Kota Makassar.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif berfokus pada kondisi objek yang alamiah, itu adalah dasar dari filsafat postpositivisme. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan informasi di lingkungan alami dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi (Anggito & Setiawan, 2018). Tipe penelitian yang digunakan adalah Studi kasus pada fenomena kemiskinan di Kota Makassar yang harus segera diatasi. Hal ini merupakan penelitian yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem. Penelitian studi kasus diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari sebuah kasus.

C. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan berasal dari sumber data primer dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang

dikaji. Data primer adalah data yang diambil secara langsung kepada informan. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua seperti dari dokumen. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan kondisi *Collaborative Governance* di Kota Makassar. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi dan *internet searching*.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi data banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut. Wawancara dilakukan terbuka, informan telah mengetahui kehadiran penulis sebagai peneliti yang melakukan wawancara di lokasi penelitian. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat tulis menulis dan perekam suara *handphone* sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian.

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling* informan dipilih berdasarkan pada tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018). Penentuan informan dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian untuk mengungkap informasi terkait kolaborasi yang terjalin antara pihak pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat. Adapun yang dijadikan informan dalam penelitian ini yaitu.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Supriadi	Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Makassar
2	Ahmad Taslim, S. Ag., M.Si.	Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Makassar
3	Astin Setiawan S.Sos	Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar
4	Ibu Sukaesi	Masyarakat Penerima Bantuan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi (Rukajat, 2018).

1. Observasi

Pengamatan yang sistematis terhadap gejala fisik dan mental disebut observasi atau pengamatan. Peneliti berpartisipasi dan tidak berpartisipasi dalam observasi. Artinya, peneliti berusaha mempelajari dan memahami perilaku orang-orang yang terlibat dengan sebisa mungkin terlibat sepenuhnya. Peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan langsung terhadap situasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan sumber data untuk menggali data dalam perspektif kata untuk mengungkapkan inti dari

masalah yang diteliti. Metode wawancara terstruktur digunakan oleh peneliti, yang melibatkan pertanyaan yang telah disiapkan khusus untuk masalah yang akan diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar. Selain itu, dokumentasi juga menggunakan *internet searching*, atau pencarian online. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumentasi digunakan selain metode observasi dan wawancara. Pada dasarnya, dokumen digunakan untuk membuat penelitian kualitatif lebih dipercaya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang bersifat kualitatif dengan cara menganalisis pernyataan dari hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang dianggap mampu untuk memberikan informasi yang akurat sesuai dengan masalah peneliti. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok menurut Miles dan Huberman (Zakariah et al., 2020) yaitu.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan maka jumlah data akan makin banyak kompleks dan rumit untuk itu perlu segera dilakukan analisis data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif dan deskriptif.

3. *Conclusion* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum tentu kebenarannya sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan transkrip wawancara dan matriks wawancara. Transkrip wawancara adalah teknik yang digunakan untuk menyimpulkan jawaban dari satu informan sedangkan matriks wawancara digunakan untuk menyimpulkan jawaban dari seluruh informan dari beberapa kategori.

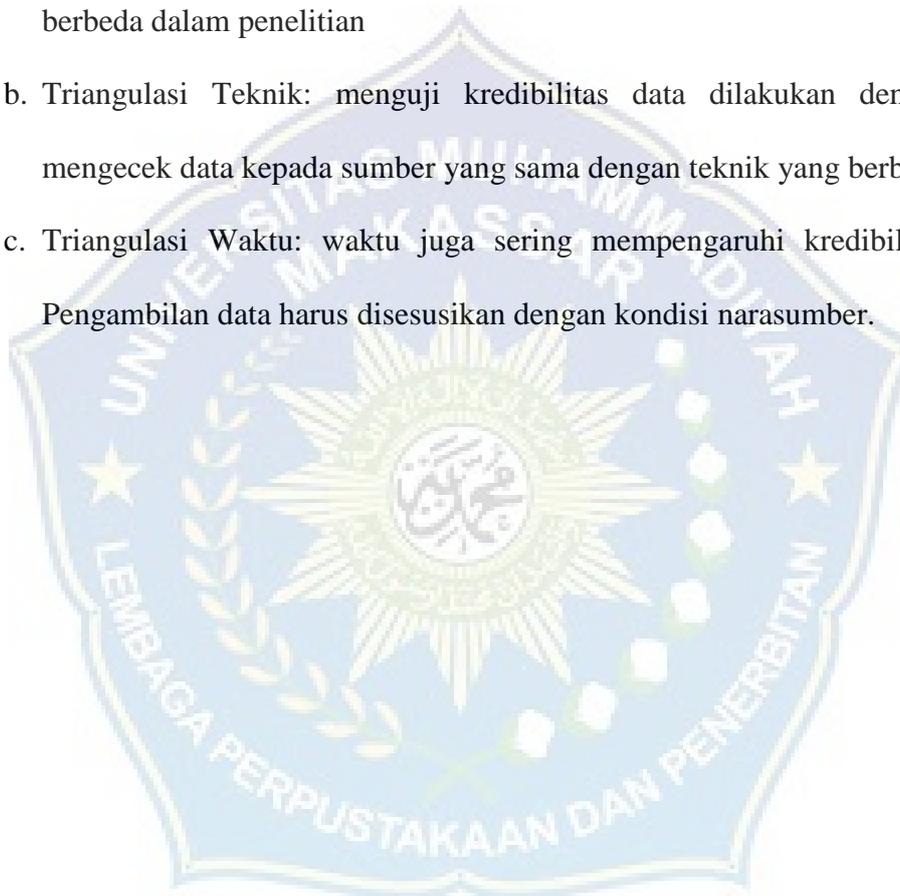
G. Keabsahan Data

Data penelitian yang dikumpulkan diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang bermutu atau data yang kredibel, oleh karena itu peneliti melakukan pengabsahan data dengan teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2012) . Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Tujuan dari triangulasi bukan

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah dikemukakan.

Melakukan Triangulasi data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu.

- a. Triangulasi Sumber: membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian
- b. Triangulasi Teknik: menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi Waktu: waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengambilan data harus disesuaikan dengan kondisi narasumber.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Profil Dinas Sosial Kota Makassar

Dinas Sosial merupakan instansi yang dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Makassar merupakan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 89).

Lembaga sosial seperti Dinas Sosial Kota Makassar memiliki visi misi yang luarbiasa dalam mengatasi permasalahan sosial di Kota Makassar termasuk dalam hal ini mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Adapun visi nya yaitu “Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang *Sombere*’ dan *Smart City* dengan Imunitas Kota untuk Semua. Selain memiliki sebuah visi, tentunya dinas sosial juga memiliki misi yang

dijalankan untuk mencapai tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Misi dari dinas sosial kota Makassar yaitu.

- a. Revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi;
- b. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua;
- c. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang *Sombere'* dan *Smart City* untuk Semua.

Dinas sosial Kota Makassar beralamat di Jl. Arif Rahman Hakim No.50, Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar.

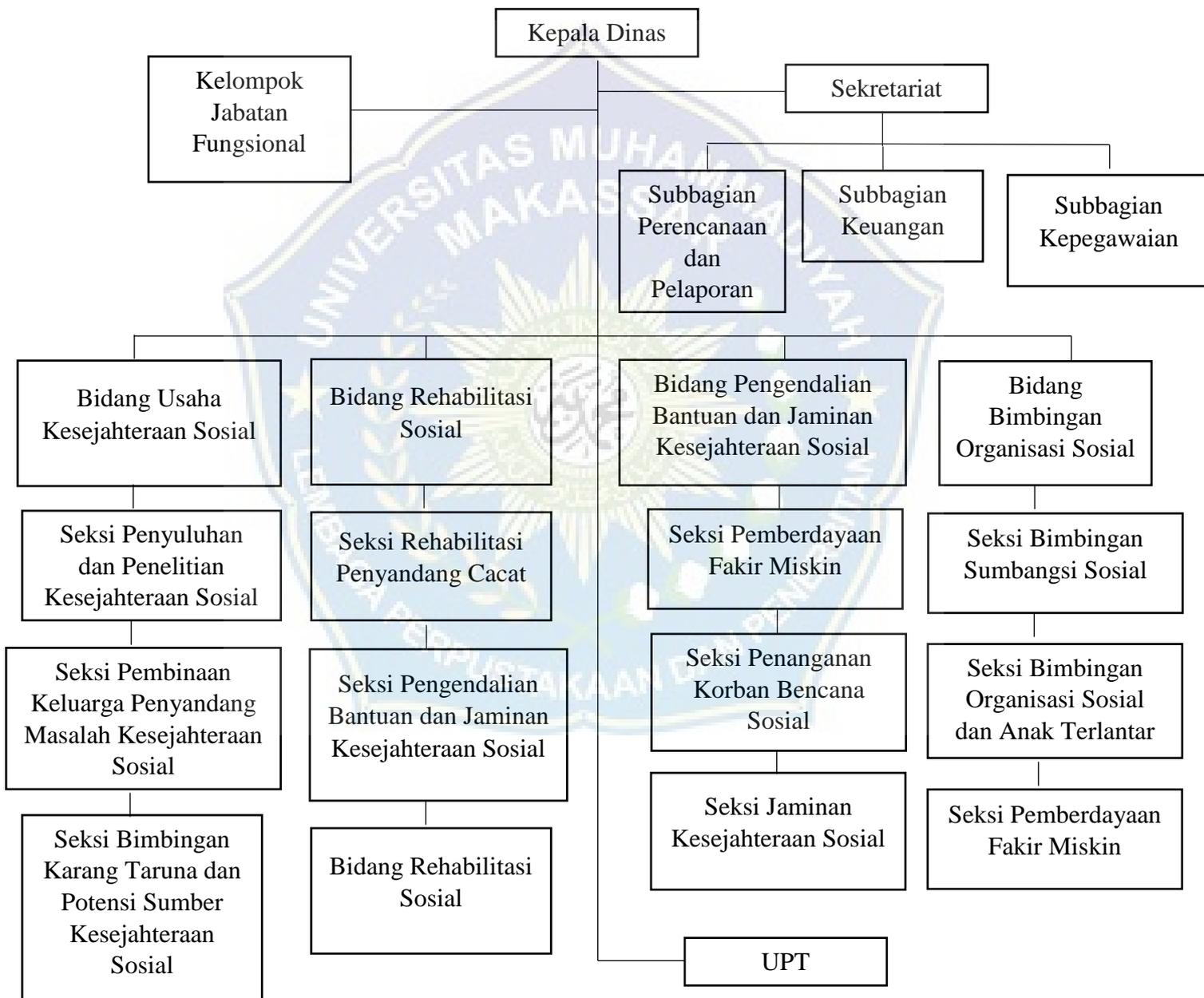


Gambar 4.1 Halaman depan dinas sosial Kota Makassar
Sumber: Olahan peneliti, 2023

Dinas sosial dalam menjalankan kinerja memiliki yang namanya struktur organisasi dengan tujuan agar segala yang akan dikerjakan dan dengan baik bisa dijalankan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar
Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar

Berdasarkan struktur organisasi di atas, tugas dan fungsi dari setiap jabatan yang ada di dinas sosial dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kepala Dinas

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 2) Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan bidang sosial;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang sosial;
- 5) Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang sosial; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas, Sekretaris dalam melaksanakan tugas dimaksud menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- 1) Perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;

- 2) Pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 3) Pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan , keuangan, umum dan kepegawaian;
- 4) Pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris juga berfungsi dalam mengontrol dan menanungi Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Keuangan serta Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang Penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pembinaan karang taruna dan melaksanakan penelitian/ pendataan PMKS dan PSKS. Sedangkan itu, Kepala Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Perencanaan kegiatan operasional kegiatan di bidang usaha kesejahteraan Sosial
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial

- 3) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya

Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial juga membawahi beberapa unsur penting di dinas sosial yaitu Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Seksi Pembinaan Keluarga PMKS dan Seksi Bimbingan Karang taruna dan PSKS yang secara rinci tugas pokok dan fungsinya yaitu.

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang usaha kesejahteraan sosial
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang usaha kesejahteraan sosial
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang usaha kesejahteraan sosial
- 4) Melaksanakan koordinasi, pensawasan dan pengendalian kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan lanjut usia, pembinaan anak usia produktif dan anak terlantar luar panti dan pelatihan keterampilan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

- 5) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan pemberdayaan peran keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- 6) Melaksanakan kegiatan penelitian/pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- 7) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan bimbingan karang taruna dan potensi sumber kesejahteraan sosial
- 8) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam meningkatkan pelayanan dan kemitraan lintas sektor dan dunia usaha
- 9) Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi
- 10) Membuat laporan akuntabilitas bidang usaha kesejahteraan sosial
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- 12) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- 14) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku

15) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan

16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi sosial penyandang cacat, rehabilitasi tuna sosial dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen, korban tindak kekerasan pekerja migran. Selain itu, kepala bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Perencanaan kegiatan operasinal di bidang rehabilitasi sosial
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang rehabilitasi sosial
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atas terkait tugas dan fungsinya

Selain tugas yang disebutkan di atas, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial membawahi seksi pelayanan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen seksi rehabilitasi penyandang cacat seksi rehabilitasi tuna sosial. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial

- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang rehabilitasi sosial
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang rehabilitasi sosial
- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelaksanaan koordinasi dan pengendalian layanan dan rehabilitasi penyandang cacat: cacat fisik (cacat tubuh, cacat netra, cacat rung wucara, cacat eks penyakit kronis/eks kusta), cacat mental (cacat retardasi, eks psikotik, epilepsi) dan cacat ganda (cacat fisik dan mental) dan tuna sosial (tuna susila, tuna wisma, waria, anak nakal eks napi) dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran
- 5) Menyusun rencana dan program pelayanan dalam dan luar panti dan rehabilitasi penyandang cacat
- 6) Menyusun rencana dan program pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial (tuna susial, tuna wisma, waria, eks narapidana dan anak nakal)
- 7) Menyusun rencana dan program pelayanan dan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen serta korban tindak kekerasan dan pekerja migran

- 8) Melaksanakan bimbingan dan pengendalian teknis pembinaan bantuan stimulan usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama
- 9) Menyiapkan bahan bimbingan dan teknis penanggulangan korban napza dan pengidap HIV/AIDS
- 10) Menyusun rencana dan program penanggulangan korban tindak kekerasan dan pekerja migran (anak, wanita dan lanjut usia) lingkup kota
- 11) Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- 13) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- 15) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai, dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 16) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
- 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengendalian bantuan, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial termasuk pengendalian daerah rawan bencana dan daerah kumuh, bantuan kepada masyarakat miskin serta bantuan kepada korban bencana alam dan sosial serta pelayanan kepada orang terlantar. Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.

- 1) Perencanaan kegiatan operasional di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial juga memiliki peran dengan mengontrol dan membawahi Seksi Penanganan Korban Bencana Sosial Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin. Adapun tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, Menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA di bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang pengendalian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
- 4) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pemberian bantuan, pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan pengendalian bantuan bencana alam dan bencana sosial
- 5) Menyusun rencana dan program pemberdayaan keluarga miskin, meliputi fakir miskin, rumah tidak layak hunidan orang terlantar;
- 6) Menyusun rencana program pemberdayaan penanganan korban bencana alam dan bencana sosial
- 7) Menyusun rencana program pemberian bantuan usaha ekonomis produktif kelompok usaha bersama dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi fakir miskin, korban bencana, pemulangan orang terlantar serta Askesos dan bantuan jaminan kesejahteraan sosial permanen
- 8) Melakukan kegiatan pembinaan dan pelatihan relawan/satuan tugas penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemcehannya
 - 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
 - 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - 12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan
 - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- f. Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan pembinaan dan pelayanan terhadap Organisasi Sosial/LSM dan anak terlantar, pengendalian dan penertiban usaha pengumpulan sumbangan sosial dan undian berhadiah serta melaksanakan pembinaan dan pemahaman pelestarian nilai kepahlawanan, keprintisan dan kejuanagan serta kesetiakawanan sosial. Kepala Bidang Bimbingan Organisasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut.
- 1) Perencanaan kegiatan operasinal di bidang Bimbingan Organisasi Sosial

- 2) Pelaksanaan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial
- 3) Pengoordinasian kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial
- 4) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Bimbingan Organisasi Sosial
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bidang bimbingan organisasi sosial juga membawahi seksi bimbingan sumbangan sosial, seksi pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta seksi bimbingan organisasi sosial dan anak terlantar. Tugas pokok dan fungsi dirinci sebagai berikut.

- 1) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang bimbingan organisasi sosial
- 2) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dibidang bimbingan organisasi sosial
- 3) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA bidang bimbingan organisasi sosial
- 4) Melaksanakan penertiban usaha-usaha pengumpulan sumbangan sosial oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat

- 5) Mengoordinasikan pelaksanaan dan pelayanan pengumpulan sumbangan sosial dan pelaksanaan undian oleh Orsos/LSM, yayasan atau kelompok masyarakat
- 6) Melaksanakan pemberian bantuan dan sumbangan yang diberikan kepada badan-badan sosial dan undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Orsos/LSM dan kelompok masyarakat
- 7) Menyusun rencana program lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Orsos binaan Dinas Sosial
- 8) Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pelestarian nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan dan kejuangan serta kesetiakawanan sosial
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
- 12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 13) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan kepada atasan

14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Profil BAZNAS Kota Makassar

Satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Kota Makassar adalah BAZNAS, yang dipimpin oleh Walikota Makassar. Menurut keputusan walikota Makassar nomor 1762/451.12/XII/2015, wali kota bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengirimkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di seluruh Kota Makassar. Sama halnya dengan organisasi lain yang memiliki visi dan misi, BAZNAS juga memiliki visi dan misi yang dijalankan dalam menjalankan program kerja. Visi dari BAZNAS Kota Makassar yaitu “Menjadikan BAZNAS terpercaya, terdepan dan bermartabat”. Adapun misi dari Kota BAZNAS dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat
- b. Membudayakan berzakat sebagai gaya hidup
- c. Menyukseskan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Menggerakkan dakwah islam melalui sinergi umat untuk kebangkitan zakat di Kota Makassar
- e. Meningkatkan manajemen pengelolaan zakat dengan menerapkan system manajemen berbasis teknologi informasi yang transparan dan akuntabel

Visi misi yang telah disusun oleh BAZNAS Kota Makassar dapat diwujudkan dengan adanya orang-orang yang selalu bersinergi dan berkomitmen dalam menjalankan kerja-kerjanya. Adapun struktur organisasi dari BAZNAS Kota Makassar yaitu.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA MAKASSAR
PERIODE 2021-2026



Gambar 4.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Makassar
Sumber: BAZNAS Kota Makassar

Akhirnya, BAZNAS menggalas beberapa program pengentasan yang ditangani oleh bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu memberikan bantuan ekonomi. Anggota bidang ini diberikan informasi dan termasuk bidang administrasi, SDM, umum, dan juga pihak masyarakat

yang terlibat dalam bantuan. Melalui program bantuan ekonomi dan pendidikan, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin. BAZNAS memiliki beberapa program kerja yaitu.

- a. Dakwah dan Advokasi
- b. Sosial Ekonomi
- c. Sosial Kesehatan
- d. Sosial Pendidikan
- e. Sosial Kemanusiaan

Melalui program ekonomi dan pendidikan, Baznas berupaya menjamin masyarakat dapat terdidik. Program ini sendiri ditujukan untuk membantu masyarakat mengenali tanggung jawab dan keterampilan mereka sehingga mereka dapat terlibat dengan kebijakan dan praktik organisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, BAZNAS harus menggunakan strategi dalam kampanye pelaksanaannya. Langkah pertama adalah mengidentifikasi banyaknya masyarakat miskin untuk memastikan bahwa langkah-langkah lainnya dapat dilakukan tepat waktu. Sebelum inisiatif Pemberdayaan terlebih dahulu dimulai, pengumpulan data dilakukan di Makassar.

B. Indikator Kemiskinan

Kriteria penduduk miskin menurut BPS adalah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari

sisi pengeluaran. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) Modul Konsumsi dan Pengeluaran.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari.

Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) Modul Konsumsi dan Pengeluaran. Kota

Makassar menjadi salah satu kota dengan garis kemiskinan terbesar kedua di Sulawesi Selatan.

C. Hasil Penelitian

Kota Makassar tersebar menjadi 15 kecamatan dengan penduduk yang lumayan padat. Adapun jumlah kecamatan beserta jumlah penduduk setiap kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Makassar (Jiwa)								
	Laki laki			Perempuan			Jumlah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Mariso	28816	28903	29007	28610	28691	28788	57426	57594	57795
Mamajang	27514	27520	27542	28535	28536	28552	56049	56056	56094
Tamalate	90393	90757	91174	90431	90776	91174	180824	181533	182348
Rappocini	70779	70802	70865	73808	73817	73868	144587	144619	144733
Makassar	40657	40699	40763	41410	41443	41502	82067	82142	82265
Ujung Pandang	11893	11895	11903	12633	12631	12638	24526	24526	24541
Wajo	14970	15002	15042	15002	15031	15068	29972	30033	30110
Bontoala	27284	27339	27410	27712	27763	27829	54996	55102	55239
Ujung Tanah	17914	17995	18087	17875	17952	18040	35789	35947	36127
Kepulauan Sangkarang	7019	7051	7087	7106	7136	7171	14125	14187	14258
Tallo	73068	73289	73552	71909	72111	72356	144977	145400	145908
Panakuk kang	69663	69693	69762	69927	69942	69997	139590	139635	139759
Manggala	73230	73649	74113	73494	73900	74349	146724	147549	148462
Biringkanaya	104472	104997	105584	104576	105079	105644	209048	210076	211228
Tamalanrea	51388	51415	51471	51789	51805	51851	103177	103220	103322
Jumlah	709060	711006	713362	714817	716613	718827	1423877	1427619	1432189

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Sumber: BPS, 2022

Penduduk miskin paling banyak terdapat di Kecamatan Tamalate 7.449



KK, Tallo 5.714 KK dari jumlah penduduk 182348, Panakkukang 4.972 KK 139759, Rappocini 4.139 KK dari jumlah penduduk sebanyak 144733, Biringkanaya 4.211 KK dari jumlah penduduk sebanyak 211228. Penduduk miskin paling sedikit di Kecamatan Wajo 433 KK, Ujung Pandang 485 KK. Kecamatan lainnya antara 1.000-3.000 KK.

Gambar 4.4 Potret rumah masyarakat di Kecamatan Tamalate

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Penduduk kota Makassar begitu banyak dan sangat kompleks, hal ini

pastinya memberikan tuntutan kepada pemerintah untuk memebrikan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Makassar. Namun, kota Makassar masih memiliki potret kemiskinan yang besar. Jumlah penduduk miskin di Kota Makassar masih termasuk dalam kategori tinggi yang dibuktikan dengan data pada tabel berikut.

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Kota Makassar	69980	74690	71830

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Miskin Kota Makassar

Sumber: BPS, 2022

Mengingat kemiskinan di Kota Makassar adalah sebuah masalah besar jadi diperlukan sebuah kolaborasi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kolaborasi adalah suatu hal penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Terutama di Indonesia sebagai Negara yang memiliki banyak permasalahan komplkas. Salah satu permasalahan yang sejak dulu dan sampai saat ini belum bisa teratasi yaitu kemiskinan. Selalu menjadi topik pembahasan tentang sulitnya cara mengatasi kemiskinan. Bahkan masalah kemiskinan telah masuk dalam poin pertama pembangunan berkelanjutan atau biasa disebut *Sustainable Development Goals 2030* (SDGs 2030). Meskipun telah menjadi tujuan

pertama dalam SDGs 2030, kemiskinan belum menunjukkan tanda-tanda untuk terselesaikan. Sebagai masalah yang kompleks kemiskinan tidak bisa menjadi masalah satu orang, namun harus menjadi keresahan dan masalah semua orang.

Ketika sudah menjadi masalah setiap orang, tentu saja penyelesaiannya juga harus diselesaikan juga dengan banyak orang. Suatu konsep yang hadir dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan menerapkan konsep *collaborative governance*. Sebuah konsep kolaborasi yang melibatkan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil dalam menyelesaikan masalah. Menerapkan konsep *collaborative governance* tidak menjamin suatu masalah akan selesai, namun setidaknya ada hal yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan. Dinas Sosial dan Badan Amil Zakat Nasional menjadi instansi memiliki tupoksi dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Dinsos dan BAZNAS juga memiliki kolaborasi dengan lembaga masyarakat dalam mengatasi kemiskinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat terkait langkah pemerintah dalam mengatasi garis kemiskinan di Kota Makassar. Terkait bantuan yang diterima oleh masyarakat.

“jadi untuk bantuan dari dinas sosial itu ada yah, seperti bantuan program keluarga harapan, ada juga biasa bantuan untuk pendidikan seperti keperluan sekolah. Kemudian dari BAZNAS itu ada bantuan zakat yang diberikan kepada kami. Dinsos dan BAZNAS sejauh ini punya peran membantu kehidupan kami” (Hasil Wawancara dengan S tanggal 25 Agustus 2023).

Selain menerima program bantuan dari Dinas Sosial dan BAZNAS informan dari masyarakat juga memberikan keterangan tentang pendapatnya terkait upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan

“kalau pemerintah itu selalu jikasih bantuan tapi itu yah biasa bantuannya masih belum mencukupi. Sampai sekarang juga masih banyak masyarakat yang terlilis kemiskinan. Jadi kalau begitu ini pekerjaan yang harus pemerintah lakukan” (Hasil Wawancara dengan S tanggal 25 Agustus 2023).

Meskipun telah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, namun bantuan tersebut belum efektif dalam mengatasi kemiskinan. Hal ini berdasarkan wawancara kepada salah satu masyarakat penerima bantuan.

“iya ada bantuannya tapi seperti program keluarga harapan uangnya tidak cukup biayai sekeluarga yah. Paling kami gunakan untuk membeli bahan pokok. Tapi harus bersyukur juga karena ada bantuan. Cuma harus ada program yang lebih berdampak lagi kalau begini. Karena contoh kami ini tinggal di Bali perumahan yang besar dengan keadaan seperti ini kalau begini tidak cocok dengan Makassar yang katanya kota besar. Jadi pemerintah itu harus kerja sama istilahnya kolaborasi misal BAZNAS dan dinstan ini bias kerja sama mengatasi kemiskinan di Kota Makassar” (Hasil Wawancara dengan S tanggal 25 Agustus 2023).

Sebagai konsep yang menghadirkan kolaborasi tiga pihak tentunya ada indikator yang harus diperhatikan dalam pengimplementasiannya. Berdasarkan teori dari Ratner pada tahun 2012 ada 3 indikator pencapaian dalam menerapkan konsep *collaborative governance* yaitu Identifikasi Hambatan (*Identifying Obstacles*), Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*) dan Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*). Baik dinas sosial dan BAZNAS harus memiliki ketiga tersebut agar mencapai tindakan kolaborasi yang baik untuk mengatasi kemiskinan menuju SDGs 2030.

Oleh karena itu, berikut hasil wawancara dengan informan Dinas sosial dan BAZNAS terkait penerapan konsep *collaborative governance*.

1. Identifikasi Hambatan (*Identifying Obstacles and Opportunities*)

Melakukan suatu kolaborasi dalam mengatasi kemiskinan bukan hanya menyatukan cara kerja dari setiap elemen, namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan identifikasi awal terakit hambatan yang terjadi sehingga terjadi masalah serta mengidentifikasi peluang yang tercipta dalam melakukan kolaborasi. Terkait hambatan yang tercipta dalam mengatasi kemiskinan yang dirasakan oleh pihak Dinas Sosial berdasarkan pada wawancara dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

“Sejauh ini, untuk melakukan kolaborasi dengan SKPD lain itu, tidak ada hambatan yang berarti. Semua SKPD bekerja sama dengan baik dalam mengatasi kemiskinan selama masih dalam koridor kerja masing-masing (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023)”.

Sedangkan pernyataan dari hasil wawancara bersama Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Makassar tentang hambatan mengatasi kemiskinan.

“Ketika melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan, beberapa hambatan yang mungkin terjadi yah seperti perbedaan pendekatan dan prioritas pastinya ini kan pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan bisa juga tentang kompleksitas isu adalah isu yang kompleks dan multifaktorial. Masing-masing pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang akar permasalahan dan cara terbaik untuk mengatasinya. Jadi, instansi yang terlibat harus memahami kompleksitas ini dan mencapai kesepakatan tentang pendekatan yang komprehensif dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi, kemudian terkait komunikasi yang tidak efektif, nah ini bahaya kalau komunikasinya tidak efektif padahal mau berkolaborasi. Hambatan ini bukan hanya di BAZNAS ataupun instansi pemerintah seperti dinsaos saja, namun kalau mau berkolaborasi saya rasa akan muncul yah hambatan seperti ini (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023)”.

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari hasil wawancara bersama Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar tentang hambatan mengatasi kemiskinan.

“Jadi, berbicara tentang hambatan mengatasi kemiskinan bukan hanya BAZNAS yang memiliki hambatan pasti setiap pihak merasakan sebuah hambatan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Hambatan yang dapat terjadi bagi suatu organisasi dalam melakukan kolaborasi seperti perbedaan pendekatan dan filosofi, bisa juga karena keterbatasan sumber daya BAZNAS dan pihak lain mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur. Jika tidak ada sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program kolaboratif, hal ini dapat menghambat keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut, kemudian ada tantangan komunikasi komunikasi yang kurang efektif atau kurang terbuka antara BAZNAS dan pihak lain dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau ketidaksesuaian dalam implementasi program. BAZNAS dan pihak lain bisa jadi memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan. Pihak yang berkolaborasi dengan BAZNAS juga pastinya memiliki perbedaan dalam kapasitas organisasi dan pengalaman dalam mengatasi kemiskinan. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat implementasi program secara efektif, terutama jika pihak lain memiliki keterbatasan dalam mengelola program yang kompleks. Pengenalan dan pemahaman yang jelas tentang hambatan-hambatan ini dapat membantu BAZNAS dan pihak lain untuk mengidentifikasi solusi yang tepat, membangun kerjasama yang kuat, dan mengatasi kendala dalam kolaborasi mereka untuk mengatasi kemiskinan secara efektif” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Mengatasi hambatan yang dirasakan saat mengatasi kemiskinan, tentu harus ada program yang dijalankan oleh setiap pihak yang bekerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial berdasarkan pada wawancara dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

“Program dalam mengatasi kemiskinan selama Tahun 2023 yaitu bantuan seragam sekolah 200 pcs, bantuan tambahan makanan (sdgs), kain kafan 1000 pcs, permandian jenazah, peti mati, dan bantuan usaha masing (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023)

Sedangkan pernyataan dari hasil wawancara bersama Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Makassar terkait program kerja yang dicanangkan oleh BAZNAS dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

“Terdapat beberapa program BAZNAS Kota Makassar yang dilaksanakan dalam mengatasi kemiskinan pertama ada program Makassar Sejahtera (Pengurangan Pengangguran dan Pelatihan Keterampilan, serta Bantuan Dana Bergulir) Peningkatan skill para Mustahik, Dana Bergulir Pengadaan Peralatan Produktif, Dana Bergulir Wirausaha Mikro, Dana Bergulir Modal Usaha Perorangan/Kelompok. Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis) Pengobatan Poli Gratis, Ambulance Gratis, Operasi Bibir Sumbing, Operasi Katarak, Kesehatan Gratis Fakir Miskin, Sunatan Massal Fakir Miskin. Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis) Bantuan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1 dan S2), Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes, Bantuan Penghapal Al-Qur'an (Hafidz), Pelatihan Pengurusan Jenazah Muslim, Pelatihan Dai/Khotib, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid, Pelatihan Guru TPQ/TPA. Makassar Peduli (Kemanusiaan/Jaminan Sosial Keluarga) Bantuan Fakir Miskin, Bantuan Sosial Keagamaan, Bantuan Bedah Rumah Fakir Miskin, Bantuan Musafir, Muallaf, Orang Yang Dililit Utang (Gharimin) dan Bantuan Bencana Fakir Miskin” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Pernyataan yang diutarakan oleh wakil ketua 1 BAZNAS sejalan dengan pernyataan Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar

“Baik pada tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya, kami telah mencapai banyak tujuan dengan program BAZNAS ini. Untuk memerangi kemiskinan, BAZNAS Kota Makassar meluncurkan program Makassar Sejahtera yang bertujuan untuk mengurangi dan memberikan pelatihan keterampilan. Selain itu, ada juga bantuan dana bergulir untuk Mustahik untuk meningkatkan keterampilan mereka, dana bergulir untuk pengadaan peralatan produktif, dana bergulir untuk wirausaha mikro dan usaha perorangan/kelompok. Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis) Memberikan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1 dan S2), Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes, Bantuan Penghapal Al-Qur'an (Hafidz), Pelatihan Pengurusan Jenazah Muslim, Pelatihan Dai/Khotib, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid, Pelatihan Guru Tadika, dan Pelatihan Pengobatan Poli. Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis) Memberikan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1 dan S2)” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Menjalin sebuah kolaborasi agar dapat berjalan dengan baik pasti harus ada sebuah sistem diskusi yang terbangun antara semua pihak yang

terlibat dalam kolaborasi mengatasi kemiskinan khususnya di Kota Makassar. Berdasarkan wawancara dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

“Sistem diskusi yang dilakukan dengan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan ini yah dengan mengadakan rapat, membicarakan peluang-peluang yang bisa dilakukan. Kemudian membahas tentang program kerja yang bisa dilakukan untuk mengatasi kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Sistem diskusi menjadi hal penting yang harus diatur oleh berbagai pihak yang menjalin kolaborasi. BAZNAS juga memiliki system diskusi yang digunakan untuk menjalin kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dari wakil ketua 1 BAZNAS tentang system diskusi yang digunakan oleh BAZNAS dalam bekerja sama mengatasi kemiskinan.

“Kalau mengatasi kemiskinan, sistem diskusi yang dilakukan dengan pihak lain itu melibatkan berbagai tahapan dan aspek yang penting. Jadi, pertama harus mengidentifikasi pihak yang relevan kemudian dari pihak BAZNAS menentukan pihak-pihak yang berperan dalam mengatasi kemiskinan misalnya pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat umum. meyusunan agenda dan menentukan topik-topik kunci yang perlu dibahas dalam diskusi, seperti kebijakan publik, peluang kerja, selain itu, perlu melibatkan ahli dan pemangku kepentingan. Tentunya dalam diskusi ini harus dibicarakan tantangan dan peluang, Bahas tantangan utama yang dihadapi dalam mengatasi kemiskinan, serta identifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan. Tinjau kebijakan dan program yang ada, dan diskusikan cara untuk meningkatkan efektivitas mereka. Mengidentifikasi solusi inovatif, kolaborasi dan aksi bersama, harus mendorong kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan ide-ide dan solusi yang dihasilkan dari diskusi. Bekerja sama dalam mengembangkan program, memperkuat kebijakan, dan menyediakan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengevaluasi dan pemantauan terhadap program kemiskinan (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Pernyataan yang sama terkait sistem diskusi yang dilakukan oleh BAZNAS berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar.

“Sistem diskusi yang digunakan dengan pihak lain untuk memerangi kemiskinan melibatkan berbagai tahapan dan elemen penting. Oleh karena itu, pertama-tama perlu diidentifikasi pihak-pihak yang relevan. Kemudian, BAZNAS akan menentukan pihak-pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat umum. mengembangkan agenda dan menentukan topik utama yang harus dibicarakan, seperti kebijakan publik dan peluang kerja, dan melibatkan pemangku kepentingan dan ahli. Tentu saja, diskusi ini harus membahas masalah dan peluang. Bahas masalah utama yang dihadapi dalam memerangi kemiskinan, serta menemukan peluang yang dapat dimanfaatkan. Lihat program dan kebijakan saat ini dan pikirkan bagaimana meningkatkan efisiensi mereka. Untuk menemukan solusi kreatif, bekerja sama, dan tindakan bersama, kolaborasi harus mendorong kolaborasi” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Kemiskinan dan pengangguran menjadi masalah global yang masih belum terselesaikan hingga sekarang. Titik sulitnya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dikemukakan oleh Dinas Sosial berdasarkan pada wawancara dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

“Untuk mengetahui tingginya kemiskinan di Makassar, harus tahu ada berapa orang miskin supaya bisa ditahu persentasenya. Di Makassar belum ada alat yang berfungsi untuk mengukur kemiskinan di Kota Makassar. Sehingga permasalahannya jumlah orang miskin di Makassar tidak bisa diperkirakan tinggi atau tidaknya. Sedangkan dari segi pendapatan pendapatan masih bisa diperdebatkan, di Makassar mereka buruh namun tidak tahu kalau di kampung mereka. Belum lagi jumlah anaknya, rumahnya, asetnya semua menjadi pertimbangan. Tapi, secara nasional sudah ada penetapannya untuk data kemiskinan ekstrim. Artinya di antara warga miskin di Makassar, berarti ada yang miskin sekali. Jadi, disinilah pentingnya kolaborasi agar bantuan kemiskinan ini bisa tepat sasaran”.

Sedangkan pernyataan dari hasil wawancara bersama Wakil Ketua 1 BAZNAS Kota Makassar terkait titik sulitnya mengatasi permasalahan kemiskinan di Kota Makassar.

“Jadi yah seperti yang diketahui kalau kemiskinan sudah menjadi masalah penting sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara. Kemiskinan adalah masalah utama negara yang salah urus. Kemiskinan telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, dan peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota. Yang lebih parah lagi, kemiskinan telah menyebabkan jutaan orang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan rumah. Kemiskinan mendorong masyarakat desa untuk melakukan apa pun untuk tetap hidup. Selama tiga dekade, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, penyediaan dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan pendampingan dan prasarana, serta penyuluhan dan pengembangan” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Hal yang sama dinyatakan oleh Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar mengenai kesulitan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

“Seperti yang diketahui, kemiskinan selalu menjadi masalah besar bagi Indonesia sebagai negara. Masalah utama negara yang salah urus adalah kemiskinan. Jutaan anak-anak tidak dapat mendapatkan pendidikan yang baik, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, dan peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota adalah semua akibat dari kemiskinan. Yang lebih parah lagi, kemiskinan telah menyebabkan jutaan orang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan rumah, dan mendorong masyarakat desa untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk tetap hidup. Selama tiga puluh tahun, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan

pertanian, pengembangan sistem kredit, pembentukan pendampingan dan prasarana, dan penyuluhan dan pengembangan” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dinas sosial dan BAZNAS memiliki berbagai program kerja yang dicanangkan dalam mengatasi kemiskinan sebagai masalah kompleks. Namun, dalam upaya mengatasi kemiskinan diperlukan sebuah kolaborasi meskipun tidak menutup kemungkinan setiap pihak yang bekerja sama dapat memiliki perbedaan pendapat akan tetapi, dengan diskusi dan komunikasi yang baik maka hambatan dalam melakukan kolaborasi dapat diatasi.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Strategi debat untuk mempengaruhi dalam konteks kolaborasi mencakup pendekatan yang membangun, membuka dialog, dan mencari solusi bersama. Pelaksanaan hal ini harus ditekankan pentingnya membangun pemahaman bersama dan mencari solusi yang menguntungkan semua pihak, bukan hanya satu kelompok. Selain itu, perlu juga mendengarkan pandangan dan argumen dari pihak lain dengan seksama. Penyelesaian kemiskinan dengan indikator ini mengharuskan setiap pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang bekerja sama untuk fokus pada masalah yang sama-sama dihadapi dan berusaha mencapai solusi yang saling menguntungkan. Realisasi dari indikator strategi debat untuk mempengaruhi juga dilakukan oleh Dinas Sosial dan BAZNAS Kota Makassar dalam mengatasi kemiskinan yang dijabarkan dari hasil wawancara dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

dinas sosial Kota Makassar terkait kerja sama yang terjalin antara dinas sosial dan instansi lain termasuk BAZNAS dalam mengatasi kemiskinan.

“Iya pastinya ada kerja sama dengan pihak lain, misalnya saja untuk jaminan kesehatan dan bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Begitu seterusnya, kalau dari BAZNAS itu sendiri tidak ada kerja sama yang terjadi hitam di atas putih, tapi mungkin dari segi sasaran bantuan ada kesamaan dengan BAZNAS itu sendiri apalagi yang berorientasi pada mengatasi kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 Mei 2023).

Terkait kolaborasi yang terjalin antara dinas sosial dan BAZNAS Kota Makassar juga dijabarkan oleh Wakil Ketua 1 BAZNAS

“Bicara tentang kolaborasi ini yah tentu ada kerja sama dengan pihak lain terutama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Kalau BAZNAS sendiri sebagai pihak swasta kerja sama yang terjalin bersama DINSOS itu mungkin hanya lebih ke melihat data base dari DINSOS untuk menjangkau masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 Mei 2023).

Pernyataan yang dijabarkan oleh wakil ketua 1 BAZNAS sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar mengenai kerja sama BAZNAS dengan pihak lain termasuk dengan dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

“BAZNAS umumnya menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam upaya mengatasi kemiskinan. Contoh kerja sama yang terjadi Kerja Sama dengan Pemerintah: BAZNAS sering bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai tingkatan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi program, dan penggunaan sumber daya yang saling mendukung. BAZNAS dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta mendukung implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah. Program Pemberdayaan Masyarakat: BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan masyarakat secara langsung untuk mengatasi kemiskinan. Mereka dapat melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat seperti lembaga amil zakat di tingkat daerah, lembaga filantropi, lembaga sosial seperti karang taruna, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan dampak program-program tersebut. Jaringan dan Kemitraan: BAZNAS juga dapat membentuk jaringan dan kemitraan dengan organisasi dan lembaga lain yang memiliki minat yang sama dalam mengatasi kemiskinan. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi tantangan tersebut. BAZNAS dapat bekerja sama dengan organisasi filantropi, perusahaan, lembaga keuangan, dan lain-lain untuk meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Kolaborasi yang terjalin ini harusnya memiliki sebuah cara yang bisa mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Dengan adanya berbagai keunggulan program kerja dari masing-masing instansi yang kemudian berkolaborasi dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Pembahasan tentang cara yang sejauh ini dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar dalam mengatasi kemiskinan dan pengurangan dijabarkan oleh Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar.

“Dari segi efektif atau tidaknya kami selalu mengusahakan yang terbaik dalam mengatasi kemiskinan di kota Makassar sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam pemberian bantuan itu pentingnya tepat sasaran artinya harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai misal, bantuan seragam sekolah diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan makanan itu namanya tidak sesuai. Makanya kami semua pihak selalu menekankan pada tepat sarasanya semua bantuan yang diberikan oleh pihak dinas sosial kepada masyarakat” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Mengusahakan yang terbaik dalam mengatasi kemiskinan juga menjadi tugas dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hal ini dijabarkan pula oleh Wakil Ketua 1 BAZNAS tentang apakah cara yang sejauh ini dianggap efektif dalam mengatasi kemiskinan.

“Saya rasa kalau untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program yang dinilai adalah hasil akhirnya. Tapi kalau melihat realitas sekarang yang dimana itu jumlah masyarakat miskin di kota Makassar belum bisa dikatakan berhasil ditasi baik itu oleh BAZNAS maupun oleh dinsos atau pihak-pihak lain yang bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan. Jadi, dari pihak BAZNAS itu sendiri selalu mengusahakan yang terbaik dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan”(Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Pernyataan yang dijabarkan oleh wakil ketua 1 BAZNAS sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar mengenai cara yang bisa dikatakan lumayan efektif untuk menekan angka kemiskinan di kota Makassar yang dilakukan oleh phak BAZNAS.

“BAZNAS dapat mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan serta menjalankan segala program kerja yang telah disusun. Pertama-tama di era digital ini saya rasa penting sekali untuk melakukan Pendekatan Berbasis Data, BAZNAS perlu memiliki data yang akurat dan terkini tentang kemiskinan. Pendekatan berbasis data memungkinkan BAZNAS untuk mengidentifikasi secara tepat kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, memahami penyebab akar masalah, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memiliki informasi yang akurat, BAZNAS dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan mencapai sasaran yang tepat. Tentunya hal penting lainnya adalah menjalain Kolaborasi dengan Pihak Terkait, BAZNAS perlu menjalin kemitraan dan kerja sama yang erat dengan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam merancang dan melaksanakan program yang efektif. BAZNAS juga dapat memanfaatkan keahlian dan jaringan mitra untuk meningkatkan pelaksanaan program serta menciptakan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Efektifnya suatu pekerjaan atau sebuah konsep yang telah dirancang menjadi inddikator yang penting untuk ditelaah. Termasuk dalam menjalan

sebuah kolaborasi semua instansi harus memahami apa dampak dari adanya sebuah konsep kolaborasi terutama konsep *collaborative governance*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar tentang pandangannya mengenai konsep kolaborasi apakah menjadi sebuah penyelesaian atau justru menjadi sebuah masalah baru hingga akhirnya efektif yang dimaksud dalam menjalankan program kerja mengatasi kemiskinan sulit untuk tercapai.

“Saya rasa tidak ada justru dengan adanya konsep kolaborasi ini bisa mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Intinya harus berkolaborasi, karena masalah miskin bukan hanya masalah satu orang saja. Miskin bukan hanya tugas dinsos tapi sebelum mereka jadi miskin itu tugasnya dinas ketenagakerjaan jangan sampai mereka tidak memiliki pekerjaan akhirnya jadi tugasnya dinsos” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Konsep kolaborasi yang hadir untuk mengatasi kemiskinan dianggap tidak memiliki masalah apapun. Hal ini dijabarkan pula oleh Wakil Ketua 1 BAZNAS tentang konsep *collaborative governance*.

“Kalau masalah tentu tidak karena kalau ada kolaborasi ini makin baik, makin banyak pihak yang bekerja sama dalam percepatan mengatasi kemiskinan, maka makin cepat pula lah nantinya masalah global kemiskinan ini di Kota Makassar dapat diatasi” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Pernyataan yang dijabarkan oleh wakil ketua 1 BAZNAS sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar mengenai kerja sama BAZNAS dengan pihak lain termasuk dengan dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

“Menerapkan konsep kolaborasi dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memberikan beberapa manfaat, tetapi juga mungkin menghadapi beberapa permasalahan yang mungkin muncul saat melakukan kolaborasi. Koordinasi dan Komunikasi menjadi hal penting Kolaborasi yang melibatkan banyak pihak membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Setiap instansi termasuk BAZNAS perlu memastikan adanya mekanisme komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat agar tujuan bersama dapat dicapai dengan efisien” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Harapan besar tentunya tersemat pada konsep *collaborative governance* ini untuk mengatasi kemiskinan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar.

“Tentu saja bisa, selama pemerintah selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan mengusahakan yang terbaik. Bukan hanya darisegi bantuan yang dibutuhkan mungkin juga bisa ada pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terjerat kemiskinan. Semua pihak pemerintah, swasta dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi dalam mengatasi kemiskinan apalagi kemiskinan ini merupakan permasalahan global yang menjadi permasalahan semua orang bukan hanya permasalahan sendiri” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Harapan yang sama juga dirasakan oleh pihak BAZNAS tentang Konsep kolaborasi yang hadir untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini dijabarkan pula oleh Wakil Ketua 1 BAZNAS tentang konsep *collaborative governance*.

“Tentu saja bisa yang intinya konsisten dan selalu satu visi misi untuk mengatasi kemiskinan. Artinya, jangan sampai ada lagi pihak-pihak lain yang menyalahgunakan kepentingannya dengan berkedok mengatasi kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Pernyataan yang dijabarkan oleh wakil ketua 1 BAZNAS sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum

BAZNAS Kota Makassar mengenai kerja sama BAZNAS dengan pihak lain termasuk dengan dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

“Konsep *Collaborative Governance* (Pemerintahan Kolaboratif) dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan jika diterapkan dengan baik. *Collaborative Governance* adalah pendekatan dimana pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara aktif bekerja sama dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program. Adanya partisipasi Aktif: Dalam *Collaborative Governance*, pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang terkena dampak kemiskinan, secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. *Collaborative Governance* memungkinkan penggabungan sumber daya dari berbagai sektor dan organisasi. Pemerintah, bisnis, LSM, dan masyarakat dapat berkontribusi dengan keahlian, pengetahuan, dan sumber daya yang berbeda untuk merancang dan melaksanakan program yang lebih efektif. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program, meningkatkan akses terhadap pelatihan kerja, pendidikan, modal usaha, dan layanan sosial yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, penting untuk diingat bahwa *Collaborative Governance* bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. Masih diperlukan komitmen, koordinasi yang baik, kepercayaan, dan pemantauan yang efektif dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti di dinas sosial dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar mengenai strategi debat untuk mempengaruhi dalam mengatasi kemiskinan dapat disimpulkan bahwa kerja sama yang terjalin antara BAZNAS dan dinas sosial tidak ada kerja sama secara langsung, namun keduanya memiliki visi yang sama untuk mengatasi kemiskinan melalui program-programnya. Namun, dalam menjangkau masyarakat yang tergolong miskin, BAZNAS menggunakan data base yang ada di dinas sosial.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Merencanakan tindakan kolaborasi antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Dinas Sosial Kota Makassar merupakan upaya yang positif dalam mengatasi kemiskinan di daerah tersebut. Kolaborasi ini memungkinkan kedua lembaga untuk menggabungkan sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman mereka guna mencapai tujuan yang sama. Kegiatan yang berjalan dengan baik tidak akan lepas dari perencanaan yang baik pula. Begitu juga dengan konsep kolaborasi yang diterapkan pastinya dimulai dengan perencanaan terlebih dahulu. Pembahasan tentang perencanaan yang dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dikemukakan oleh Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar.

“Dari segi perencanaan tentu saja ini adalah hal yang perlu direncanakan matang-matang terlebih dahulu. Program kerja dalam mengatasi kemiskinan itu harus diatasi dalam berbagai sisi. Merencanakan tindakan kolaborasi yah dengan menggencarkan rapat-rapat koordniasi dengan semua SKPD atau pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, perlu nya evaluasi dari segi program kerja yang dijalankan. Semua pihak harus bekerja ekstra karena miris rasanya jika hanya banyak bicara atau banyak program kerja, namun tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Melihat sekarang angka kemiskinan di Indonesia khususnya di kota Makassar selalu mengalami peningkatan” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Perencanaan yang matang dalam mengatasi kemiskinan juga dijabarkan

Wakil Ketua 1 BAZNAS.

“Dengan rencana yang sudah kita buat, kita juga melihat dan memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan setiap bulan atau setiap tahunnya. Karena beberapa masyarakat miskin menghadapi masalah ekonomi yang berbeda, kita memilih dan memilih berdasarkan hasil pantauan lapangan untuk memberikan bantuan bulanan dan tahunan” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Pernyataan yang dijabarkan oleh wakil ketua 1 BAZNAS sejalan dengan pernyataan dari Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar mengenai perencanaan yang harus dilakukan oleh setiap pihak dalam mengatasi kemiskinan terutama dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar.

“Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan melalui program-programnya. Dimulai dengan analisis dan Identifikasi Masalah, BAZNAS bersama dengan pihak yang diajak berkolaborasi melakukan analisis mendalam terkait dengan kemiskinan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya misalnya di Kota Makassar ini. Analisis ini mencakup identifikasi penyebab, karakteristik populasi yang terkena dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan pemahaman yang baik tentang masalah, BAZNAS dapat merancang program yang relevan dan efektif. BAZNAS merencanakan program pelatihan dan pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu yang terkena dampak kemiskinan. BAZNAS melakukan perencanaan untuk menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan untuk mengoptimalkan upaya mengatasi kemiskinan. Perencanaan meliputi identifikasi mitra potensial, pembagian tugas, dan pengaturan kerangka kerja kerjasama. Terus BAZNAS juga merencanakan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberhasilan program-program yang dilakukan. dengan pengumpulan data dan indikator kinerja yang relevan, BAZNAS dapat memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan perbaikan jika diperlukan” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Melakukan perencanaan yang telah diatur dengan baik tentu sangat dipengaruhi oleh alur komunikasi yang terjalin. Sebuah kolaborasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya alur komunikasi yang tercipta antara pihak yang bekerja sama. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar memberikan penjelasan lebih jauh terkait alur komunikasi yang dilakukan oleh dinas sosial dan pihak lain.

“Kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta melibatkan alur komunikasi yang penting untuk memastikan kerjasama yang efektif dan efisien. Setidaknya ada hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan kolaborasi dengan pemerintah. Pertama Identifikasi tujuan kolaborasi yah langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan kolaborasi dan hasil yang ingin dicapai. Ini melibatkan penentuan masalah yang akan diselesaikan atau proyek yang akan dilakukan bersama. Komunikasi awal antara kedua belah pihak diperlukan untuk memahami dengan jelas tujuan kolaborasi dan ekspektasi yang ada. Kedua Penentuan peran dan tanggung jawab: Setelah tujuan kolaborasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Terus yang ketiga penyusunan rencana kerja, Rencana kerja yang terperinci perlu disusun untuk menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam kolaborasi. Rencana ini harus mencakup jadwal, anggaran, sumber daya yang diperlukan, dan metrik evaluasi kinerja. Komunikasi yang terus-menerus dan terbuka diperlukan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang rencana kerja ini. Keempat Komunikasi rutin, selama kolaborasi, komunikasi rutin antara kedua belah pihak sangat penting. Pertemuan secara teratur, baik melalui pertemuan tatap muka, konferensi telepon, atau melalui platform komunikasi online, diperlukan untuk memastikan saluran komunikasi terbuka dan informasi terkini dapat dibagikan dengan tepat waktu. Kelima Penanganan masalah, Dalam kolaborasi, mungkin timbul masalah atau hambatan yang perlu ditangani. Komunikasi yang efektif diperlukan dalam mengidentifikasi, mengomunikasikan, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Pihak-pihak yang terlibat harus berkomunikasi secara proaktif untuk memecahkan masalah dengan cepat dan efisien. Dan terakhir itu Evaluasi dan umpan balik: Pada akhir kolaborasi, penting untuk melakukan evaluasi bersama dan memberikan umpan balik. Komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai hasil kolaborasi, kesuksesan, dan area peningkatan akan membantu dalam menginformasikan kolaborasi di masa depan” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Wakil ketua 1 BAZNAS Kota Makassar juga memberikan penjelasan terkait alur komunikasi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam bekerja sama mengatasi kemiskinan di kota Makassar.

“Untuk menjamin kerja sama yang efektif dan efisien, kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta membutuhkan alur komunikasi yang penting. Langkah pertama adalah menentukan tujuan kolaborasi dan hasil yang ingin dicapai, seperti menentukan masalah yang akan

diselesaikan atau proyek yang akan dikerjakan bersama. Komunikasi awal tentang tujuan kolaborasi harus dimulai dengan identifikasi tujuan kolaborasi” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Mengingat betapa pentingnya kontribusi alur komunikasi dalam menjalin kolaborasi, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar juga memberikan pendapatnya tentang alur komunikasi yang seharusnya dilakukan.

“Alur komunikasi dalam kolaborasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tingkat kerjasama yang dilakukan pertama tama kita melakukan Identifikasi Pihak Terkait: BAZNAS perlu mengidentifikasi pihak pemerintah dan masyarakat yang relevan untuk kolaborasi. Pihak pemerintah bisa meliputi instansi terkait, seperti kementerian, dinas, atau lembaga terkait di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Pihak masyarakat bisa meliputi organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi, atau komunitas terdampak. Pertemuan dan Diskusi, langkah selanjutnya adalah mengatur pertemuan atau diskusi yang melibatkan semua pihak terkait. Pertemuan ini bisa dilakukan dalam bentuk rapat formal, lokakarya, atau forum diskusi terbuka. Tujuan pertemuan ini adalah untuk saling bertukar informasi, berbagi pemahaman, serta membahas isu-isu yang relevan dengan upaya mengatasi kemiskinan” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Pentingnya adanya hubungan kerja dalam menjalin kolaborasi untuk mengatasi kemiskinan sangatlah signifikan. Kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat, dapat membawa manfaat yang besar dalam mengatasi masalah sosial ini. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar memberikan penjelasan hubungan kerja dinas sosial dalam mengatasi kemiskinan di kota Makassar.

“Kalau hubungan kerja antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memerangi kemiskinan di Kota Makassar. Jadi, tiga pihak ini itu bekerja sama dalam misalnya

pemerintah membuat kebijakan dan program yang mendukung penanggulangan kemiskinan, seperti program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga dapat menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, seperti akses ke listrik, air bersih, dan transportasi yang baik. Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja. Yah Selanjutnya, pihak swasta bisa bertanggung jawab untuk menciptakan pekerjaan” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Sebagai lembaga penyaluran zakat dan menjadi salah satu lembaga yang memiliki peran dalam mengatasi kemiskinan, tentu ada hubungan kerja yang dilakukan oleh BAZNAS. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan wakil ketua 1 BAZNAS.

“Jadi ini Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya di Indonesia dikelola oleh BAZNAS. Jadi, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai cara untuk memerangi kemiskinan di Kota Makassar dengan menekankan koordinasi dan sinergi. BAZNAS dan pemerintah Kota Makassar bekerja sama dan bekerja sama untuk memaksimalkan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kedua pihak berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama melalui diskusi, pertemuan, dan kerja sama dalam pelaksanaan program-program. Pendistribusian Zakat, BAZNAS mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat, termasuk zakat penghasilan, zakat fitrah, dan zakat mal. Pemerintah Kota Makassar membantu mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Sejalan dengan pernyataan dari wakil ketua 1 BAZNAS Kota Makassar, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar juga memberikan penjelasan tentang hubungan kerja yang dijalin BAZNAS.

“Badan Amil Zakat Nasional, juga dikenal sebagai BAZNAS, mengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya di Indonesia. Dalam beberapa cara, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk memerangi kemiskinan: Koordinasi dan Sinergi:

BAZNAS dan pemerintah Kota Makassar bekerja sama dan bekerja sama untuk memaksimalkan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kedua belah pihak berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Ini dilakukan melalui percakapan, pertemuan, dan kolaborasi dalam menjalankan program. Pendistribusian Zakat: BAZNAS mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat, termasuk zakat penghasilan, zakat fitrah, dan zakat mal. Pemerintah Kota Makassar membantu mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat sosial seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Selanjutnya yang menjadi unsur penting ketika merencanakan tindakan kolaborasi adalah terletak pada seberapa intens pertemuan yang dilakukan oleh setiap pihak. Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dinas sosial Kota Makassar memberikan penjelasan terkait pertemuan yang dilakukan dinasi sosial dalam mengatasi kemiskinan.

“Dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kota Makassar seringkali terdapat pertemuan dan kolaborasi rutin antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Pemerintah kota biasanya memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertemuan tersebut. Mereka dapat mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan instansi terkait, seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan dinas pengembangan ekonomi. Pertemuan ini bertujuan untuk saling berbagi informasi, mengkoordinasikan program-program yang ada, dan merencanakan strategi yang holistik untuk mengatasi kemiskinan. Selain pertemuan pemerintah, mungkin juga terdapat forum atau kelompok kerja yang melibatkan perwakilan dari sektor swasta, lembaga nirlaba, universitas, dan masyarakat sipil” (Hasil Wawancara dengan S, tanggal 26 mei 2023).

Pertemuan adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan kolaborasi. Pertemuan menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk kembali mengevaluasi program kerja yang dijalankan. Melakukan pertemuan juga akan membantu mengeratkan kolaborasi yang terjalin. Wakil ketua 1

BAZNAS memberikan pendapatnya melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentang pertemuan rutin bagi pihak yang menjalankan kolaborasi.

“Bersama pihak yang kami ajak kerjasama tentu ada yang sebuah pertemuan yang diadakan. Tapi kalau dinsos tadi kan sudah saya bilang kalau kerja sama nya hanya dari segi data base yang dibutuhkan oleh BAZNAS. Seperti rapat ini penting untuk menyatukan persepsi dan membahas mengenai kerja sama yang terjalin. Bagaimana progresnya dan hal yang menjadi kekurangannya” (Hasil Wawancara dengan AT, tanggal 23 mei 2023).

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh wakil ketua 1 BAZNAS, Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum BAZNAS Kota Makassar juga turut memberikan penjelasan terkait pertemuan rutin ini.

“Dalam beberapa cara, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk memerangi kemiskinan dengan senantiasa berkoordinasi melalui pertemuan atau rapat yang juga menjadi tempat evaluasi” (Hasil Wawancara dengan AS, tanggal 23 mei 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa baik BAZNAS maupun dinas sosial harus memiliki sebuah perencanaan yang matang dalam melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu, sangat penting dalam kolaborasi untuk selalu mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja setiap pihak terkait dalam hal ini mengatasi kemiskinan. Setiap pihak harus bekerja sama dengan baik dalam mengatasi kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah setiap orang sehingga penyelesaiannya harus dari berbagai sisi. Walaupun BAZNAS dan dinas sosial tidak memiliki kerja sama yang terjalin di hitam atas putih, dalam artian hanya bekerja melalui pertukaran data namun keduanya telah bekerja sama sebagai pihak pemerintah dan swasta

yang bergerak mengatasi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat kota Makassar.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Collaborative governance dalam mengatasi kemiskinan di kota Makassar dalam hal ini pada dinas sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki masing-masing program kerja yang dicanangkan. Jika, mengacu pada pengertian *collaborative governance* BAZNAS dan dinas sosial belum sepenuhnya menerapkan konsep *collaborative governance*. Walaupun di sisi lain keduanya berpendapat bahwa adanya konsep *collaborative governance* itu sangat penting untuk mengatasi kemiskinan. Lebih jelasnya indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur *collaborative governance* pada dinas sosial dan BAZNAS dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Identifikasi Hambatan (*Identifying Obstacles*)

Fase pertama ini, Identifikasi Hambatan, adalah fase mendengarkan. Pada titik ini, pemangku kepentingan yang bekerja sama mengidentifikasi berbagai tantangan yang dapat muncul selama proses kerja sama. Sebagai pemerintah, Dinas Sosial dan Baznas berkolaborasi untuk memerangi kemiskinan di Kota Makassar. Setelah keduanya menjelaskan masalah yang ada, mereka akan mempertimbangkan hal-hal untuk menyelesaikan setiap masalah yang telah diidentifikasi, termasuk mencari solusi untuk masalah yang akan datang. Pada dasarnya, fase ini

adalah waktu untuk mendengarkan satu sama lain tentang masalah dan mendapatkan manfaat dari masalah yang dibahas oleh masing-masing pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari tahu dan mengkaji tentang *collaborative governance* di dinas sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengatasi kemiskinan. Dalam hal ini terkhusus pada pembahasan identifikasi hambatan dapat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan yang signifikan untuk bekerja sama dengan SKPD lain. Selama SKPD tetap berada dalam koridor masing-masing. Pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatasi kemiskinan di masa depan. Meskipun begitu, setiap pihak baik baznas maupun dinas sosial memiliki berbagai program kerja yang dicanangkan untuk mengatasi kemiskinan. Namun, lagi-lagi masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan membutuhkan langkah yang luarbiasa dalam mengatasinya.

Dengan akar kemiskinan yang susah untuk dituntaskan maka konsep ekonomi islam dalam islam terkait dengan zakat, infaq dan shadaqah memegang peranan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin yang mungkin saja terjadi akibat perbedaan dari status sosial masyarakat dan yang sebaliknya akan menumbuhkan hubungan solidaritas yang kokoh antar sesama. Jika hal ini menjadi landasan pemikiran dalam landasan ekonomi, maka kebijakan fiskal dalam rangka mengatur sistem ekonomi

menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai aktualisasi atau kewajiban dari penjabaran dari kewajiban mengeluarkan zakat agar terdistribusi sesuai tujuan dan pemanfaatannya.

Dinas social dan BAZNAS masing-masing memiliki program kerja dalam mengatasi kemiskinan, jadi, alangkah baiknya kedua pihak membicarakan lebih lanjut tentang hambatan yang dialami masing-masing pihak agar bias menyelesaikan permasalahan kemiskinan.

2. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

Pada tahap ini dinas sosial dan BAZNAS berbicara tentang hambatan yang telah disebutkan sebelumnya. Hal-hal yang dibicarakan oleh masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat adalah tentang cara terbaik untuk memecahkan masalah. Setelah itu, bicaralah tentang pihak-pihak yang dapat membantu menyelesaikan masalah kolaborasi yang telah dijelaskan.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebagai usaha mencari tahu dan mengkaji lebih jauh tentang peran dinas sosial dan BAZNAS dalam berkolaborasi mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Disimpulkan bahwa pihak dinas sosial dan BAZNAS tidak memiliki kerja sama langsung dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Namun, dinas sosial dan BAZNAS merupakan pihak yang memiliki visi dan misi untuk menuntaskan belunggu kemiskinan yang masih bertahta di kota Makassar.

Terlebih lagi kemiskinan sudah menjadi masalah kompleks dan global yang menjadi poin pertama pada SDGs 2030. Jadi, sangat perlu bagi instansi bekerja sama secara langsung demi mengatasi kemiskinan. Meskipun tidak bekerja sama secara langsung, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pihak BAZNAS tetap memiliki kaitan dengan dinas sosial. Hal ini ditunjukkan melalui data base yang digunakan oleh BAZNAS merujuk pada dinas sosial.

Dinas social dan BAZNAS telah memiliki hubungan dalam hal pertukaran database, namun hal ini tidak cukup jika koordinasi yang dilakukan hanya sebatas ini. Dinas social dan BAZNAS direkomendasikan untuk bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

3. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

Merencanakan tindakan kolaborasi adalah proses yang melibatkan perencanaan dan pengorganisasian upaya bersama antara dua atau lebih entitas atau individu untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi ini melibatkan mengidentifikasi kesempatan kolaborasi, menentukan tujuan bersama mengembangkan rencana kerja yang jelas, membagi tanggung jawab, dan mengatur sumber daya yang diperlukan.

Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan tindakan klaborasi adalah harus ada sebuah evaluasi dalam bentuk pertemuan yang diadakan oleh pihak yang bekerja sama. Berdasarkan hasil penelitian pada skripsi ini, sebuah kolaborasi harus dimulai dengan perencanaan yang matang. Baik dinsos maupun BAZNAS sangat merasakan bahwa kemiskinan

bukanlah masalah satu orang tapi sudah menjadi masalah setiap umat manusia. Untuk menjamin kerja sama yang efektif dan efisien, kolaborasi dengan pihak swasta atau pemerintah membutuhkan alur komunikasi yang penting. Dalam menerapkan kolaborasi dengan pemerintah, setidaknya ada tindakan yang harus diambil. Pertama, tentukan tujuan kerja sama. Langkah pertama adalah menentukan tujuan kerja sama dan hasil yang diinginkan. Ini mencakup menentukan masalah yang akan diselesaikan atau proyek yang akan dikerjakan bersama. Pertama-tama, kedua belah pihak harus berkomunikasi untuk memahami tujuan kolaborasi dan harapan yang ada. Kedua, Penentuan peran dan tanggung jawab: Setelah tujuan kerja sama ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Ketiga, membuat rencana kerja: Rencana kerja yang rinci harus dibuat untuk menjelaskan apa yang akan dilakukan bersama. Rencana ini harus mencakup waktu, anggaran, sumber daya, dan metrik yang diperlukan.

Dalam melakukan kolaborasi perlu adanya sinergi dari berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat. Dalam mengatasi kemiskinan dinas social dan BAZNAS memberikan bantuan kepada masyarakat miskin meskipun belum maksimal namun, hal ini bisa menjadi satu langkah mengatasi kemiskinan. Masyarakat berharap kedepannya ada sebuah program kolaborasi antara dinas social dan BAZNAS untuk mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

E. Matriks Hasil Temuan Penelitian

No	Sub Fokus	Informan	Temuan
1.	Identifikasi Hambatan (<i>Identifying Obstacles</i>)	Supriadi	<p>Tidak ada hambatan yang signifikan untuk bekerja sama dengan SKPD lain. Selama SKPD tetap berada dalam koridor kerja mereka. Bekerja sama dengan baik untuk memerangi kemiskinan. Setiap pihak harus bekerja sama untuk menjalankan program untuk mengatasi tantangan yang dirasakan dalam mengatasi kemiskinan. Program dinas sosial untuk mengatasi kemiskinan pada tahun 2023 termasuk bantuan seragam sekolah 200 pcs, bantuan tambahan makanan (sdgs), 1000 pcs kain kafan, permandian jenazah, dan peti mati. Sistem diskusi juga harus dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang. sistem percakapan yang dilakukan dengan pihak lain untuk memerangi kemiskinan ini dengan mengadakan pertemuan untuk membahas peluang yang mungkin. Kemudian berbicara tentang program kerja yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Sebagai</p>

			<p>hasil dari wawancara dengan Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial mengungkapkan tantangan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Untuk mengetahui tingkat kemiskinan di Makassar, Anda harus tahu berapa banyak orang miskin. Tidak ada alat yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan di Makassar. Jadi, tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besar jumlah orang miskin di Makassar. Sementara pendapatan masih dapat diperdebatkan, mereka bekerja di Makassar tetapi tidak mengetahuinya di rumah mereka.</p>
		<p>Ahmad Taslim, S. Ag., M.Si.</p>	<p>Ketika berkolaborasi dengan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan, ada beberapa hambatan yang mungkin terjadi, seperti perbedaan pendekatan dan prioritas. Ini juga berarti bahwa masing-masing pihak yang terlibat mungkin memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatasi kemiskinan, karena kemiskinan adalah masalah yang kompleks dengan banyak faktor. Ada kemungkinan bahwa masing-masing pihak memiliki pemahaman yang berbeda tentang sumber masalah dan metode terbaik untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, organisasi yang terlibat harus memahami kompleksitas ini dan mencapai</p>

		<p>konsensus bahwa pendekatan yang komprehensif dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi. Tidak hanya BAZNAS, tetapi juga instansi pemerintah seperti dinsos menghadapi tantangan seperti ini saat berkolaborasi. Untuk memerangi kemiskinan, BAZNAS Kota Makassar memiliki beberapa program, termasuk program Makassar Sejahtera yang berfokus pada pengurangan pengangguran dan pelatihan keterampilan, serta bantuan dana bergulir untuk mustahik untuk meningkatkan keterampilan mereka, dan dana bergulir untuk pengadaan peralatan produktif. Sistem diskusi yang digunakan dengan pihak lain untuk memerangi kemiskinan melibatkan berbagai tahapan dan elemen penting. Oleh karena itu, pertama-tama perlu diidentifikasi pihak-pihak yang relevan. Kemudian, BAZNAS akan menentukan pihak-pihak seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat umum. Mengembangkan agenda dan menentukan topik utama yang harus dibicarakan, seperti kebijakan publik dan peluang kerja, dan melibatkan pemangku kepentingan dan ahli. Tentu saja, diskusi ini harus membahas masalah dan peluang. Bahas masalah utama yang dihadapi dalam memerangi kemiskinan, serta menemukan peluang yang</p>
--	--	--

			dapat dimanfaatkan.
		Astin Setiawan S.Sos	<p>Ketika berbicara tentang tantangan dalam mengatasi kemiskinan, semua orang di Kota Makassar merasakan tantangan tersebut, tidak hanya BAZNAS. BAZNAS dan organisasi lain mungkin menghadapi kendala dalam melakukan kolaborasi, seperti perbedaan pendekatan dan filosofi, karena mereka mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur. Tidak adanya sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program kolaboratif dapat menghambat keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut, dan masalah komunikasi dapat muncul sebagai akibatnya. Ada kemungkinan bahwa BAZNAS dan organisasi lain memiliki tujuan dan tujuan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan. Untuk memerangi kemiskinan, ada banyak langkah dan elemen penting yang harus dilewati. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait harus diidentifikasi terlebih dahulu. Selanjutnya, BAZNAS akan menyelidiki semua pihak yang terlibat: pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga akademik, sektor swasta, komunitas lokal, dan masyarakat umum. mengembangkan agenda dan memilih topik penting seperti kebijakan publik dan peluang kerja, dan melibatkan pemangku kepentingan dan</p>

			ahli. Tentu saja, diskusi ini harus membahas masalah dan peluang. Bahas masalah utama dalam memerangi kemiskinan, serta menemukan peluang untuk dimanfaatkan.
2.	Strategi Debat untuk Mempengaruhi (<i>Debating Strategies for Influence</i>)	Supriadi	Sangat penting untuk bekerja sama dengan pihak lain, seperti untuk jaminan kesehatan dan bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Dengan cara yang sama, meskipun tidak ada kerja sama hitam di atas putih dari BAZNAS itu sendiri, namun ada sasaran bantuan yang serupa dengan BAZNAS itu sendiri, terutama yang berkaitan dengan memerangi kemiskinan. Dinas sosial selalu berusaha yang terbaik untuk mengurangi kemiskinan di Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tepat sasaran adalah penting dalam memberikan bantuan, yang berarti bahwa itu harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Dengan konsep kerja sama ini, kemiskinan di Kota Makassar dapat diatasi. Karena kemiskinan bukan masalah satu orang, penting untuk bekerja sama. Bukan tanggung jawab dinsos untuk membantu mereka yang miskin, tetapi tanggung jawab dinas ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pekerjaan sebelum dinsos akhirnya melakukannya.
		Ahmad Taslim, S. Ag., M.Si.	Dalam hal kerja sama, tentu ada kerja sama dengan pihak lain, terutama dalam menangani kemiskinan di Kota Makassar. Sebagai bagian dari

		<p>kerja sama DINSOS, BAZNAS hanya dapat memanfaatkan data base DINSOS untuk membantu mereka yang hidup dalam kemiskinan.</p> <p>Hasil akhir menentukan seberapa efektif program yang dinilai. Namun, melihat keadaan saat ini, tidak mungkin mengatakan bahwa BAZNAS dan dinsa atau organisasi lain yang bekerja sama untuk mengatasi kemiskinan telah berhasil mengurangi jumlah orang miskin di Makassar. Oleh karena itu, BAZNAS terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang beruntung.</p> <p>Terlebih lagi jika ada kerja sama yang lebih baik, akan ada lebih banyak pihak yang bekerja sama untuk mempercepat penghapusan kemiskinan di Kota Makassar. Dengan demikian, masalah global kemiskinan akan segera diselesaikan.</p>	
		<p>Astin Setiawan S.Sos.</p>	<p>BAZNAS biasanya bekerja sama dengan banyak orang, seperti pemerintah dan masyarakat, untuk memerangi kemiskinan. Contoh kerja sama dengan pemerintah: BAZNAS biasanya bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Contoh kerja sama termasuk penggunaan sumber daya yang saling mendukung, koordinasi program, dan pertukaran informasi. BAZNAS dapat bekerja sama secara langsung dengan masyarakat dalam memerangi kemiskinan, dan</p>

		<p>juga dapat memberikan masukan kepada kebijakan dan program pemerintah terkait penanggulangan kemiskinan. Mereka dapat melibatkan komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain melaksanakan semua program kerja yang telah disusun, BAZNAS memiliki kemampuan untuk mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan. Jika diterapkan dengan benar, gagasan pemerintahan kolaboratif, atau pemerintahan kolaboratif, dapat menjadi strategi yang berguna untuk memerangi kemiskinan. Collaborative governance adalah cara di mana pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat bekerja sama secara aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program. Adanya partisipasi aktif: Dalam pemerintahan kolaboratif, masyarakat yang terkena dampak kemiskinan secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Sumber daya yang berasal dari berbagai organisasi dan sektor dapat digabungkan melalui manajemen kolaboratif. Untuk membuat dan menerapkan program yang lebih efisien, pemerintah, bisnis, LSM, dan masyarakat dapat berbagi</p>
--	--	--

			keahlian, pengetahuan, dan sumber daya.
3.	Merencanakan Tindakan Kolaborasi (<i>Planning Collaborative Actions</i>)	Supriadi	Dalam hal perencanaan, untuk mengatasi kemiskinan, program kerja harus dilakukan secara menyeluruh. Mengadakan rapat koordinasi dengan semua SKPD atau pihak-pihak yang bersangkutan untuk merencanakan tindakan kolaborasi. Selain itu, evaluasi harus dilakukan berdasarkan program kerja yang dijalankan. Karena miris rasanya jika hanya banyak bicara atau program kerja, tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, semua pihak harus bekerja lebih keras. Sekarang kemiskinan di Indonesia, terutama di kota Makassar, terus meningkat.
		Ahmad Taslim, S. Ag., M.Si.	Badan Amil Zakat Nasional, juga dikenal sebagai BAZNAS, bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya di Indonesia. BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah di Kota Makassar dalam berbagai cara dengan menekankan koordinasi dan sinergi. BAZNAS dan pemerintah Kota Makassar bekerja sama dan bekerja sama untuk memaksimalkan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kedua belah pihak berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Ini dilakukan melalui percakapan, pertemuan, dan kolaborasi dalam menjalankan program. Pendistribusian

		<p>Zakat: BAZNAS mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat, termasuk zakat penghasilan, zakat fitrah, dan zakat mal. Pemerintah Kota Makassar membantu mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat sosial seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha. Sebuah pertemuan pasti diadakan dengan pihak yang diajak kerjasama. Namun, bahwa kerja sama tersebut terbatas pada pengumpulan data BAZNAS yang diperlukan yang berasal dari dinas sosial.</p>
	<p>Astin Setiawan S.Sos</p>	<p>Melalui program-programnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memainkan peran penting dalam memerangi kemiskinan. Dimulai dengan analisis dan identifikasi masalah: BAZNAS melakukan analisis menyeluruh tentang kemiskinan di wilayah yang diawasinya, seperti di Kota Makassar ini. Analisis ini mencakup penemuan penyebab kemiskinan, serta karakteristik populasi yang terkena dampak. BAZNAS dapat membuat inisiatif yang relevan dan berhasil jika dia memahami masalah dengan baik. BAZNAS mengatur program pelatihan dan pemberdayaan untuk meningkatkan keterampilan orang yang terkena dampak kemiskinan. BAZNAS berencana bekerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan</p>

			swasta. Sumber daya, pengetahuan, dan jaringan dapat digabungkan melalui kerja sama.
4.	Wawancara dengan Masyarakat	Ibu Sukaesi	Terdapat bantuan yang didapatkan oleh masyarakat yaitu misalnya program keluarga harapan dan bantuan zakat dari BAZNAS. Walaupun demikian bantuan ini belum efektif untuk sedikit demi sedikit mengatasi kemiskinan. Jadi masyarakat berharap adanya kolaborasi antara dinas sosial dan BAZNAS dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Collaborative Governance adalah aspek penting dalam mencapai kemiskinan di wilayah Makassar, karena melibatkan kolaborasi berbagai *stakeholder*. Proses pemerintahan kolaboratif melibatkan mengidentifikasi rintangan, mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, dan menerapkan strategi untuk pengaruh dalam hal ini studi pada dinas sosial dan Badan Amil Zakat Nasional. Tahap pertama pemerintahan kolaboratif melibatkan mengidentifikasi hambatan, yang dapat dicapai melalui kolaborasi para pemangku kepentingan. Proses ini melibatkan mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan dan menerapkan strategi untuk mencapainya.

Tahap kedua dari pemerintahan kolaboratif melibatkan mengidentifikasi strategi untuk pengaruh, yang melibatkan menganalisis efektivitas strategi dan sejauh mana mereka dapat diterapkan. Proses kolaborasi yang terjalin antara dinas sosial dan BAZNAS ini dapat dicapai melalui database, yang merupakan komponen penting dari sektor sosial untuk mengidentifikasi masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan. Tahap ketiga dari *collaborative governance* melibatkan perencanaan tindakan kolaborasi antara BAZNAS dan dinas sosial, yang melibatkan mengidentifikasi kebutuhan pemangku kepentingan, menerapkan strategi, dan mengevaluasi hasil. Proses ini harus melibatkan penilaian menyeluruh dari hasil dan kebutuhan pemangku kepentingan, serta komitmen untuk implementasi strategi dan hasil.

Akhirnya, *collaborative governance* sangat penting untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Makassar. Dengan mengidentifikasi rintangan dan peluang, menerapkan strategi untuk pengaruh, dan menerapkan tindakan kolaboratif, pemerintah dapat bekerja menuju mencapai SDGs 2030.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada dinas sosial dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti demi memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Adapun saran dari peneliti dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Mengingat permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang kompleks maka, pemerintah harus lebih mengerahkan banyak cara dalam mengatasinya. Meskipun ada berbagai instansi yang bertugas dalam menekan angka kemiskinan namun hal ini belum efektif.
2. Peneliti menyarankan agar kedepannya BAZNAS dan dinas sosial kota Makassar dapat bekerja sama secara langsung untuk mengatasi kemiskinan sesuai konsep dari *collaborative governance*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, Z., & Astuti, R. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kepariwisata Yang Berkelanjutan. *Conference on Public Administration and Society*, 01(01), 92–118.
<http://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/view/22>.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Photosynthetica*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Cahyono. (2021). Implementasi Model Collaborative Governance Dalam Penyelesaian Pandemi Covid-19. *Jurnal PUBLICIANA*, 13(1), 83–88.
<https://doi.org/10.36563/p.v13i1.207>
- Chotimah, H. C., Iswardhana, M. R., & Rizky, L. (2022). Model Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah Plastik Laut Guna Mewujudkan Ketahanan Maritim di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(3), 348.
<https://doi.org/10.22146/jkn.69661>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 3(2), 200.
<https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Faidati, & Muthmainnah.(2019). Collaborative Governance dalam Pengembangan UMKM di Era Revolusi Industri. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*,3(1).<https://knia.stialanbandung.ac.id/index.php/knia/article/view>

w/130.

- Gazzola, P., Pavione, E., Amelio, S., & Magrì, J. (2020). Smart Industry e sviluppo sostenibile, imprese intelligenti e SDGs 2030. *Economia Aziendale Online*, 11(1), 41–53. <https://doi.org/10.13132/2038-5498/11.1.41-53>
- Ginanjari, R. A. F., Setyadi, S., & Suiroh, U. (2018). Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 227–248. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>
- Hadilinatih, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Penambangan Minyak Bumi Secara Tradisional Di Langkat. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1–12. <http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/berita->
- Ishartono, I., Rusyidi, B., & Raharjo, S. T. (2017). Potret Orang Miskin Dari Perspektif Kekuatan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13816>
- Kasna, I. K. (2020). Dampak Pengangguran Kemiskinan Dan Konsep Teoritisnya Pada Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 3(2), 58–61. <https://doi.org/10.47532/jic.v3i2.202>
- Megawati, S., Niswah, F., & Oktariyanda, T. A. (2020). Collaborative Governance as Handling Efforts of Pandemic Covid-19 in Surabaya City. 473(April), 312–316. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.201014.067>

- Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative Governance on Ecotourism: Towards Sustainable Tourism Development. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Prabu Aji, S., & Kartono, D. T. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal Of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i6.110>
- Rasbin, 2018. (2018). Studi Di Kota Yogyakarta Dan Malang (Regional Government Efforts To Reduce Poverty and Unemployment : Study in Yogyakarta and Malang City). *Jurnal Kajian*, 23(2), 129–142. <http://dx.doi.org/10.22212/kajian.v23i2.1878>.
- Ratner, B. D., Barman, B., Cohen, P., Kosal, M., Nagoli, J., & Allison, E. H. (2012). *Strengthening Governance Across Scales in Aquatic Agricultural Systems*. *Worldfish Center Publications*, 10, (18). <http://hdl.handle.net/1834/25322>.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887>
- Salsabila, L., & Sadayi, D. P. (2022). Collaborative Governance dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo. *Dialektika Publik : Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*, 6(1), 28–34. <https://doi.org/10.33884/dialektikapublik.v6i1.5452>
- Setiawan, M. Y., Novianti, T., & Najib, M. (2021). The Impact of Bank Indonesia Regulation No. 17/3/2015 on Exchange Rate: Analysis Using Vector Error

Correction Model (VECM). *Binus Business Review*, 12(2), 131–141.

<https://doi.org/10.21512/bbr.v12i2.6570>

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

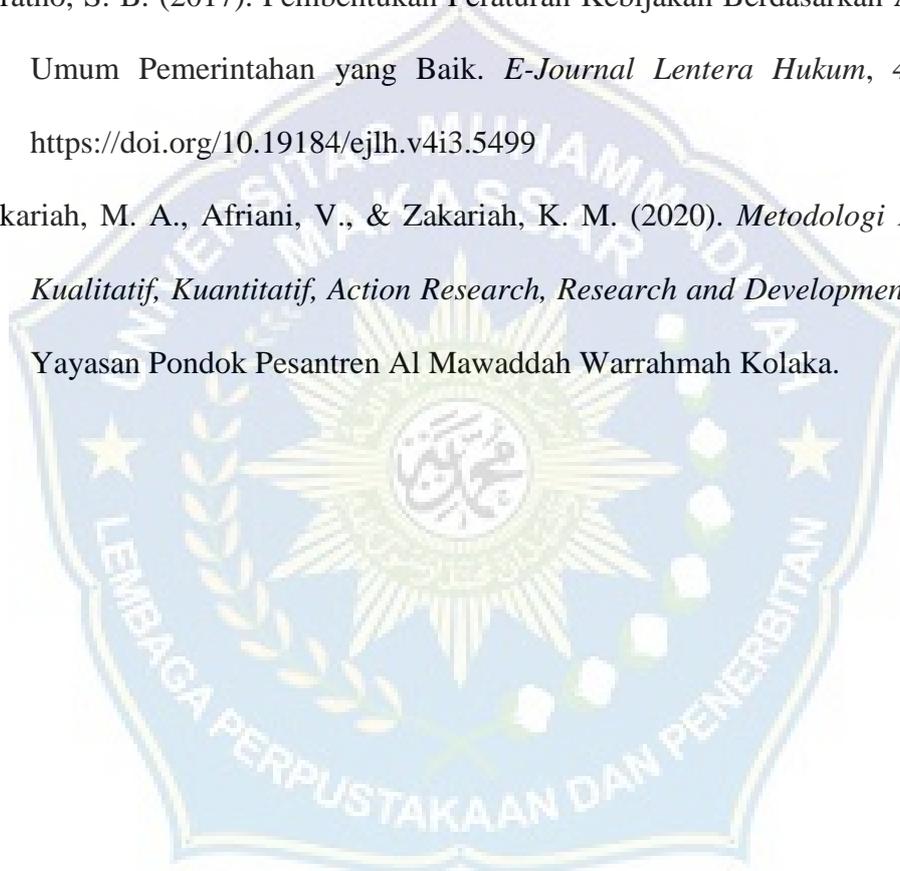
Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R dan D*. In *Alfabeta*.

Suratno, S. B. (2017). Pembentukan Peraturan Kebijakan Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *E-Journal Lentera Hukum*, 4(3), 164.

<https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5499>

Zakariah, M. A., Afriani, V., & Zakariah, K. M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development (R n D)*.

Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 : Lampiran Wawancara

Wawancara bersama Bapak Supriadi penyuluh Seksi Penyuluhan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial





Wawancara bersama Bapak Ahmad Taslim, S. Ag., M.Si. selaku Wakil Ketua 1 BAZNAS dan Astin Setiawan S.Sos selaku Kepala Bagian Administrasi SDM dan Umum



Wawancara bersama Ibu Sukaesi salah satu penerima bantuan



Pengurusan izin di Dinas Sosial dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Makassar.



Lampiran 2: SK Pembimbing



**Universitas
Muhammadiyah
Makassar**
Integrity • Professionalism • Entrepreneurship

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Faculty of Social and Political Sciences
Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221
Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588
Official Email :fisip@unismuh.ac.id
Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI
Nomor : 1501/FSP/A.5-VI/IX/1444/2022

Berdasarkan usulan judul penulisan skripsi mahasiswa tentang rencana judul dan susunan pembimbing mahasiswa dan telah disetujui Ketua Jurusan. Dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unismuh Makassar menugaskan pengajar yang namanya tersebut di bawah ini sebagai pembimbing penulisan skripsi saudara :

Nama : Yuliana
Stambuk : 105641112119
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Dengan Rencana Judul Skripsi :

“Collaborative Governance dan Kontribusi Generasi Z dalam Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran Menuju SDGS 2030 Pada Karang Taruna Kabupaten Bone”

Pembimbing I : Dr. Hj. Ihyant Malik, S.Sos., M.Si
Pembimbing II : Ahmad Taufik, S.P., M.AP

Tugas ini hendaknya dilaksanakan secara sistimatis, berkesinambungan dan bertanggungjawab, serta dilakukan evaluasi secara berkala tentang kemajuan dan Hasil penulisan yang telah dicapai.

Di tetapkan : di Makassar,
Pada tanggal : 26 September 2022

Dekan,



Dr. Hj. Ihyant Malik, S.Sos., M.Si
NBM 730727

Tembusan Kepada yth :

1. Pembimbing I
2. Pembimbing II
3. Ketua Jurusan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1280/05/C.4-VIII/IV/1444/2023 21 Ramadhan 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 12 April 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0573/FSP/A.1-VIII/IV/1444 H/2023 M tanggal 10 April 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : YULIANA
 No. Stambuk : 10564 1112119
 Fakultas : Fakultas Sosial dan Politik
 Jurusan : Ilmu Pemerintahan
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MENUJU SDGS 2030 DI KOTA MAKASSAR"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 April 2023 s/d 15 Juni 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716

04-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougainville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor	: 16145/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Walikota Makassar
Perihal	: Izin penelitian	

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1280/05/C 4-VIII/IV/1444/2023 tanggal 12 April 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: YULIANA	
Nomor Pokok	: 105641112119	
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan	
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)	
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 250 Makassar	

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MENUJU SDGs 2030 DI KOTA MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **11 Mei s/d 11 Juni 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 11 Mei 2023

A. n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. MUH SALEH, M.Si.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
Nip : 19690717 199112 1002

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Peringgal



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ahmad Yani Nomor 2, Bulu Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90171
 Laman dpmptsp.makassarkota.go.id Pos-el dpmptsp@makassarkota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/346/SKP/DPMPTSP/V/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Keterangan Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
3. Peraturan Walikota Makassar Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16145/S.01/PTSP/2023 Tanggal 11 Mei 2023;
5. Rekomendasi Teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Nomor 070/348-II/BKBP/V/2023 Tanggal 19 Mei 2023.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama	: YULIANA
NIM / Jurusan	: 105641112119 / Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan	: Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Lokasi Penelitian	: Dinas Sosial Kota Makassar, Ketua Baznas Kota Makassar, Ketua Karang Taruna Kota Makassar
Waktu Penelitian	: 11 Mei s/d 11 Juni 2023
Tujuan	: Skripsi
Judul Penelitian	: "COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGATASI KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN MENUJU SDGs 2030 DI KOTA MAKASSAR"

Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan selama waktu yang sudah ditentukan dalam surat keterangan ini.
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul dan tujuan kegiatan Penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar melalui email balangoldta@kesbangpolmks@gmail.com.
4. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.



Makassar, 22 Mei 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si.

Lampiran 4: Pedoman Wawancara

Peneliti menulis pertanyaan di bawah ini sebagai topik utama, dan selama wawancara, peneliti membuat pertanyaan tambahan mengikuti alur pembicaraan bersama informan. Proses wawancara dilakukan dengan membagi pertanyaan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ratner tentang *Collaborative Governance* pada masing-masing informan:

A. Identifikasi Hambatan (*Identifying Obstacles*)

1. Apa saja hambatan yang dialami jika melakukan kolaborasi dengan pihak lain?
2. Dalam mengatasi kemiskinan, penyelesaian atau program seperti apa yang dicanangkan?
3. Permasalahan apa saja yang selama ini menjadi titik sulitnya mengatasi kemiskinan?

B. Strategi Debat untuk Mempengaruhi (*Debating Strategies for Influence*)

1. Apakah ada kerja sama atau kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan?
2. Dari banyaknya permasalahan dalam mengatasi kemiskinan, apa cara yang paling efektif dilakukan?
3. Apakah ada permasalahan yang terjadi jika dalam mengatasi kemiskinan dengan menerapkan konsep kolaborasi?
4. Apakah konsep *collaborative Governance* menurut anda bisa mengatasi kemiskinan?

C. Merencanakan Tindakan Kolaborasi (*Planning Collaborative Actions*)

1. Perencanaan apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan?
2. Bagaimana alur komunikasi yang terjadi saat melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta?
3. Bagaimana hubungan kerja antara pihak pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar?
4. Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan dengan berbagai instansi lain dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar.

Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Apakah saudara menerima bantuan dari Dinas Sosial dan BAZNAS Kota Makassar?
2. Bagaimana pendapat anda tentang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan?
3. Jika ada program yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, apakah program tersebut efektif?

Lampiran 5. Matriks Wawancara

Matriks Wawancara

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	JAWABAN INFORMAN		
			1	2	3
1	Identifikasi Hambatan	Apa saja hambatan yang dialami jika melakukan kolaborasi dengan pihak lain?	Sejauh ini, untuk melakukan kolaborasi dengan SKPD lain itu, tidak ada hambatan yang berarti. Semua SKPD bekerja sama dengan baik dalam mengatasi kemiskinan selama masih dalam koridor kerja masing-masing	Ketika melakukan kolaborasi dengan pihak lain dalam mengatasi kemiskinan, beberapa hambatan yang mungkin terjadi yah seperti perbedaan pendekatan dan prioritas pastinya ini kan pihak-pihak yang terlibat mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan bisa juga tentang kompleksitas isu adalah isu yang kompleks dan multifaktorial. Masing-masing pihak mungkin memiliki pemahaman yang berbeda tentang akar permasalahan dan cara terbaik untuk mengatasinya. Jadi,	Jadi, berbicara tentang hambatan mengatasi kemiskinan bukan hanya BAZNAS yang memiliki hambatan pasti setiap pihak merasakan sebuah hambatan dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Hambatan yang dapat terjadi bagi suatu organisasi dalam melakukan kolaborasi seperti perbedaan pendekatan dan filosofi, bisa juga karena keterbatasan sumber daya BAZNAS dan pihak lain mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya, baik itu dana, personel, atau infrastruktur. Jika tidak ada sumber daya yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program kolaboratif, hal ini dapat menghambat keberlanjutan dan keberhasilan program tersebut, kemudian ada tantangan

				<p>instansi yang terlibat harus memahami kompleksitas ini dan mencapai kesepakatan tentang pendekatan yang komprehensif dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi, kemudian terkait komunikasi yang tidak efektif, nah ini bahaya kalau komunikasinya tidak efektif padahal mau berkolaborasi. Hambatan ini bukan hanya di BAZNAS ataupun instansi pemerintah seperti dinsos saja, namun kalau mau berkolaborasi saya rasa akan muncul yah hambatan seperti ini</p>	<p>komunikasi komunikasi yang kurang efektif atau kurang terbuka antara BAZNAS dan pihak lain dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau ketidaksesuaian dalam implementasi program. BAZNAS dan pihak lain bisa jadi memiliki prioritas dan kepentingan yang berbeda dalam mengatasi kemiskinan. Pihak yang berkolaborasi dengan BAZNAS juga pastinya memiliki perbedaan dalam kapasitas organisasi dan pengalaman dalam mengatasi kemiskinan. Ketidakseimbangan ini dapat menghambat implementasi program secara efektif, terutama jika pihak lain memiliki keterbatasan dalam mengelola program yang kompleks. Pengenalan dan pemahaman yang jelas tentang hambatan-hambatan ini dapat membantu BAZNAS dan pihak lain untuk mengidentifikasi solusi yang tepat, membangun kerjasama yang kuat, dan</p>
--	--	--	---	---	---

					mengatasi kendala dalam kolaborasi mereka untuk mengatasi kemiskinan secara efektif
	Dalam mengatasi kemiskinan, penyelesaian atau program seperti apa yang dicanangkan?	Program dalam mengatasi kemiskinan selama Tahun 2023 yaitu bantuan seragam sekolah 200 pcs, bantuan tambahan makanan (sdgs), kain kafan 1000 pcs, permandian jenazah, peti mati, dan bantuan usaha masing	Terdapat beberapa program BAZNAS Kota Makassar yang dilaksanakan dalam mengatasi kemiskinan pertama ada program Makassar Sejahtera (Pengurangan Pengangguran dan Pelatihan Keterampilan, serta Bantuan Dana Bergulir) Peningkatan skill para Mustahik, Dana Bergulir Pengadaan Peralatan Produktif, Dana Bergulir Wirausaha Mikro, Dana Bergulir Modal Usaha Perorangan/Kelompok, Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis) Pengobatan Poli Gratis, Ambulance Gratis, Operasi Bibir Sumbing,	Baik pada tahun 2023 maupun tahun-tahun sebelumnya, kami telah mencapai banyak tujuan dengan program BAZNAS ini. Untuk memerangi kemiskinan, BAZNAS Kota Makassar meluncurkan program Makassar Sejahtera yang bertujuan untuk mengurangi dan memberikan pelatihan keterampilan. Selain itu, ada juga bantuan dana bergulir untuk Mustahik untuk meningkatkan keterampilan mereka, dana bergulir untuk pengadaan peralatan produktif, dana bergulir untuk wirausaha mikro dan usaha perorangan/kelompok. Makassar Sehat (Pelayanan Kesehatan Gratis) Memberikan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1 dan S2), Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes, Bantuan Penghapal Al-Qur'an (Hafidz),	

				<p>Operasi Katarak, Kesehatan Gratis Fakir Miskin, Sunatan Massal Fakir Miskin. Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis) Bantuan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1 dan S2), Bantuan Sekolah Madrasah/Ponpes, Bantuan Penghapal Al-Qur'an (Hafidz), Pelatihan Pengurusan Jenazah Muslim, Pelatihan Dai/Khotib, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid, Pelatihan Guru TPQ/TPA. Makassar Peduli (Kemanusiaan/Jaminan Sosial Keluarga) Bantuan Fakir Miskin, Bantuan Sosial Keagamaan, Bantuan Bedah Rumah Fakir Miskin, Bantuan Musafir, Muallaf, Orang Yang Dililit Utang (Gharimin) dan Bantuan</p>	<p>Pelatihan Pengurusan Jenazah Muslim, Pelatihan Dai/Khotib, Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid, Pelatihan Guru Tadika, dan Pelatihan Pengobatan Poli. Makassar Cerdas (Pelayanan Pendidikan Gratis) Memberikan Beasiswa Anak Sekolah dan Mahasiswa (S1 dan S2)”</p>
--	--	--	---	--	---

		<p>Permasalahan apa saja yang selama ini menjadi titik sulitnya mengatasi kemiskinan?</p>	<p>Untuk mengetahui tingginya kemiskinan di Makassar, harus tahu ada berapa orang miskin supaya bisa ditahu persentasenya. Di Makassar belum ada alat yang berfungsi untuk mengukur kemiskinan di Kota Makassar. Sehingga permasalahannya jumlah orang miskin di Makassar tidak bisa diperkirakan tinggi atau tidaknya. Sedangkan dari segi pendapatan pendapatan masih bisa diperdebatkan, di Makassar mereka buruh namun tidak tahu kalau di kampung mereka. Belum lagi jumlah anaknya, rumahnya, asetnya semua menjadi pertimbangan. Tapi, secara nasional sudah ada penetapannya untuk data kemiskinan ekstrim. Artinya di antara warga miskin di Makassar, berarti</p>	<p>Bencana Fakir Miskin</p> <p>Jadi yah seperti yang diketahui kalau kemiskinan sudah menjadi masalah penting sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara. Kemiskinan adalah masalah utama negara yang salah urus. Kemiskinan telah menyebabkan jutaan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, dan peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota. Yang lebih parah lagi, kemiskinan telah menyebabkan jutaan orang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka</p>	<p>Seperti yang diketahui, kemiskinan selalu menjadi masalah besar bagi Indonesia sebagai negara. Masalah utama negara yang salah urus adalah kemiskinan. Jutaan anak-anak tidak dapat mendapatkan pendidikan yang baik, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan investasi, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan keluarga, dan peningkatan arus urbanisasi ke kota-kota adalah semua akibat dari kemiskinan. Yang lebih parah lagi, kemiskinan telah menyebabkan jutaan orang tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pakaian, dan rumah, dan mendorong masyarakat desa untuk melakukan apa pun yang mereka bisa untuk tetap hidup. Selama tiga puluh tahun, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar</p>
--	--	---	---	---	--

			<p>ada yang miskin sekali. Jadi, disinilah pentingnya kolaborasi agar bantuan kemiskinan ini bisa tepat sasaran</p>	<p>seperti makanan, pakaian, dan rumah. Kemiskinan mendorong masyarakat desa untuk melakukan apa pun untuk tetap hidup. Selama tiga dekade, penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, penyediaan dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan pendampingan dan prasarana, serta penyuluhan dan pengembangan</p>	<p>seperti makanan, pelayanan kesehatan, pendidikan, peningkatan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pengembangan sistem kredit, pembentukan pendampingan dan prasarana, dan penyuluhan dan pengembangan</p>
2	Strategi Debat untuk Mempengaruhi	Apakah ada kerja sama atau kolaborasi yang terjalin antara pemerintah dan pihak lain dalam mengatasi	Iya pastinya ada kerja sama dengan pihak lain, misalnya saja untuk jaminan kesehatan dan bekerja sama dengan BPJS kesehatan. Begitu seterusnya, kalau dari BAZNAS itu sendiri	Bicara tentang kolaborasi ini yah tentu ada kerja sama dengan pihak lain terutama dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Kalau BAZNAS sendiri sebagai	BAZNAS umumnya menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, dalam upaya mengatasi kemiskinan. Contoh kerja sama yang terjadi Kerja Sama dengan

		kemiskinan?	tidak ada kerja sama yang terjadi hitam di atas putih, tapi mungkin dari segi sasaran bantuan ada kesamaan dengan BAZNAS itu sendiri apalagi yang berorientasi pada mengatasi kemiskinan	pihak swasta kerja sama yang terjalin bersama DINSOS itu mungkin hanya lebih ke melihat data base dari DINSOS untuk menjangkau masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan	<p>Pemerintah: BAZNAS sering bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai tingkatan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi program, dan penggunaan sumber daya yang saling mendukung. BAZNAS dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, serta mendukung implementasi program yang dilakukan oleh pemerintah. Program Pemberdayaan Masyarakat: BAZNAS juga dapat bekerja sama dengan masyarakat secara langsung untuk mengatasi kemiskinan. Mereka dapat melibatkan komunitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok</p>
--	--	-------------	--	---	---

					<p>masyarakat seperti lembaga amil zakat di tingkat daerah, lembaga filantropi, lembaga sosial seperti karang taruna, dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan dampak program-program tersebut. Jaringan dan Kemitraan: BAZNAS juga dapat membentuk jaringan dan kemitraan dengan organisasi dan lembaga lain yang memiliki minat yang sama dalam mengatasi kemiskinan. Kolaborasi semacam ini dapat memperkuat kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi tantangan tersebut. BAZNAS dapat bekerja sama dengan organisasi filantropi, perusahaan, lembaga keuangan, dan lain-lain untuk meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan</p>
		<p>Dari banyaknya permasalahan dalam mengatasi kemiskinan, apa cara yang paling efektif dilakukan?</p>	<p>Dari segi efektif atau tidaknya kami selalu mengusahakan yang terbaik dalam mengatasi kemiskinan di kota Makassar sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi,</p>	<p>Saya rasa kalau untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program yang dinilai adalah hasil akhirnya. Tapi kalau melihat realitas sekarang</p>	<p>BAZNAS dapat mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi kemiskinan serta menjalankan segala program kerja yang telah disusun. Pertama-tama</p>

			<p>dalam pemberian bantuan itu pentingnya tepat sasaran artinya harus sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai misal, bantuan seragam sekolah diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan makanan itu namanya tidak sesuai. Makanya kami semua pihak selalu menekankan pada tepat sasaran semua bantuan yang diberikan oleh pihak dinas sosial kepada masyarakat</p>	<p>yang dimana itu jumlah masyarakat miskin di kota Makassar belum bisa dikatakan berhasil ditasi baik itu oleh BAZNAS maupun oleh dinsa atau pihak-pihak lain yang bekerja sama dalam mengatasi kemiskinan. Jadi, dari pihak BAZNAS itu sendiri selalu mengusahakan yang terbaik dalam menyalurkan zakat kepada masyarakat yang membutuhkan</p>	<p>di era digital ini saya rasa penting sekali untuk melakukan Pendekatan Berbasis Data, BAZNAS perlu memiliki data yang akurat dan terkini tentang kemiskinan. Pendekatan berbasis data memungkinkan BAZNAS untuk mengidentifikasi secara tepat kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan, memahami penyebab akar masalah, dan merancang program yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan memiliki informasi yang akurat, BAZNAS dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan mencapai sasaran yang tepat. Tentunya hal penting lainnya adalah menjalin Kolaborasi dengan Pihak Terkait, BAZNAS perlu menjalin kemitraan dan kerja sama yang erat dengan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini memungkinkan pertukaran</p>
--	--	--	---	--	---

				<p>pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman dalam merancang dan melaksanakan program yang efektif. BAZNAS juga dapat memanfaatkan keahlian dan jaringan mitra untuk meningkatkan pelaksanaan program serta menciptakan sinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan</p>
	<p>Apakah ada permasalahan yang terjadi jika dalam mengatasi kemiskinan dengan menerapkan konsep kolaborasi?</p>	<p>Saya rasa tidak ada justru dengan adanya konsep kolaborasi ini bisa mengatasi kemiskinan di Kota Makassar. Intinya harus berkolaborasi, karena masalah miskin bukan hanya masalah satu orang saja. Miskin bukan hanya tugas dinsos tapi sebelum mereka jadi miskin itu tugasnya dinas ketenagakerjaan jangan sampai mereka tidak memiliki pekerjaan akhirnya jadi tugasnya dinsos</p>	<p>Kalau masalah tentu tidak karena kalau ada kolaborasi ini makin baik, makin banyak pihak yang bekerja sama dalam percepatan mengatasi kemiskinan, maka makin cepat pula lah nantinya masalah global kemiskinan ini di Kota Makassar dapat diatasi</p>	<p>Menerapkan konsep kolaborasi dalam upaya mengatasi kemiskinan melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dapat memberikan beberapa manfaat, tetapi juga mungkin menghadapi beberapa permasalahan yang mungkin muncul saat melakukan kolaborasi. Koordinasi dan Komunikasi menjadi hal penting Kolaborasi yang melibatkan banyak pihak membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik. Setiap instansi termasuk BAZNAS perlu memastikan adanya mekanisme komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat agar</p>

					tujuan bersama dapat dicapai dengan efisien
		Apakah konsep <i>collaborative Governance</i> menurut anda bisa mengatasi kemiskinan?	Tentu saja bisa, selama pemerintah selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan mengusahakan yang terbaik. Bukan hanya darisegi bantuan yang dibutuhkan mungkin juga bisa ada pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terjerat kemiskinan. Semua pihak pemerintah, swasta dan masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi dalam mengatasi kemiskinan apalagi kemiskinan ini merupakan permasalahan global yang menjadi permasalahan semua orang bukan hanya permasalahan sendiri	Tentu saja bisa yang intinya konsisten dan selalu satu visi misi untuk mengatasi kemiskinan. Artinya, jangan sampai ada lagi pihak-pihak lain yang menyalahgunakan kepentingannya dengan berkedok mengatasi kemiskinan	Konsep <i>Collaborative Governance</i> (Pemerintahan Kolaboratif) dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi kemiskinan jika diterapkan dengan baik. <i>Collaborative Governance</i> adalah pendekatan dimana pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara aktif bekerja sama dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan atau program. Adanya partisipasi Aktif: Dalam <i>Collaborative Governance</i> , pihak-pihak yang terlibat, termasuk masyarakat yang terkena dampak kemiskinan, secara aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. <i>Collaborative Governance</i> memungkinkan penggabungan sumber daya dari berbagai sektor dan organisasi. Pemerintah, bisnis, LSM, dan masyarakat dapat berkontribusi

					dengan keahlian, pengetahuan, dan sumber daya yang berbeda untuk merancang dan melaksanakan program yang lebih efektif. Kolaborasi ini dapat memperluas jangkauan program, meningkatkan akses terhadap pelatihan kerja, pendidikan, modal usaha, dan layanan sosial yang diperlukan untuk mengurangi kemiskinan. Namun, penting untuk diingat bahwa <i>Collaborative Governance</i> bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan. Masih diperlukan komitmen, koordinasi yang baik, kepercayaan, dan pemantauan yang efektif dari semua pihak yang terlibat untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengurangi kemiskinan
3	Merencanakan Tindakan Kolaborasi	Perencanaan apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kemiskinan	Dari segi perencanaan tentu saja ini adalah hal yang perlu direncanakan matang-matang terlebih dahulu. Program kerja dalam mengatasi kemiskinan itu harus diatasi dalam	Dengan rencana yang sudah kita buat, kita juga melihat dan memantau kondisi sosial ekonomi masyarakat yang membutuhkan bantuan setiap bulan atau setiap	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam mengatasi kemiskinan melalui program-programnya. Dimulai dengan analisis dan Identifikasi Masalah, BAZNAS bersama dengan pihak

			<p>berbagai sisi. Merencanakan tindakan kolaborasi yah dengan mengengcarkan rapat-rapat koordniasi dengan semua SKPD atau pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, perlu nya evaluasi dari segi program kerja yang dijalankan. Semua pihak harus bekerja ekstra karena miris rasanya jika hanya banyak bicara atau banyak program kerja, namun tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Melihat sekarang angka kemiskinan di Indonesia khususnya di kota Makassar selalu mengalami peningkatan</p>	<p>tahunnya. Karena beberapa masyarakat miskin menghadapi masalah ekonomi yang berbeda, kita memilih dan memilih berdasarkan hasil pantauan lapangan untuk memberikan bantuan bulanan dan tahunan</p>	<p>yang diajak berkolaborasi melakukan analisis mendalam terkait dengan kemiskinan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya misalnya di Kota Makassar ini. Analisis ini mencakup identifikasi penyebab, karakteristik populasi yang terkena dampak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan pemahaman yang baik tentang masalah, BAZNAS dapat merancang program yang relevan dan efektif. BAZNAS merencanakan program pelatihan dan pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas individu yang terkena dampak kemiskinan. BAZNAS melakukan perencanaan untuk menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta. Kolaborasi ini memungkinkan penggabungan sumber daya, pengetahuan, dan jaringan untuk</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>mengoptimalkan upaya mengatasi kemiskinan. Perencanaan meliputi identifikasi mitra potensial, pembagian tugas, dan pengaturan kerangka kerja kerjasama. Terus BAZNAS juga merencanakan sistem monitoring dan evaluasi untuk mengukur dampak dan keberhasilan program-program yang dilakukan. dengan pengumpulan data dan indikator kinerja yang relevan, BAZNAS dapat memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan perbaikan jika diperlukan</p>
	<p>Bagaimana alur komunikasi yang terjadi saat melakukan kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta</p>	<p>Kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta melibatkan alur komunikasi yang penting untuk memastikan kerjasama yang efektif dan efisien. Setidaknya ada hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan kolaborasi dengan pemerintah. Pertama Identifikasi tujuan kolaborasi yah langkah</p>	<p>Untuk menjamin kerja sama yang efektif dan efisien, kolaborasi dengan pihak pemerintah atau swasta membutuhkan alur komunikasi yang penting. Langkah pertama adalah menentukan tujuan kolaborasi dan hasil yang ingin dicapai, seperti menentukan masalah yang akan diselesaikan atau</p>	<p>Alur komunikasi dalam kolaborasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tingkat kerjasama yang dilakukan pertama tama kita melakukan Identifikasi Pihak Terkait: BAZNAS perlu mengidentifikasi pihak pemerintah dan masyarakat yang relevan untuk kolaborasi. Pihak pemerintah bisa meliputi instansi terkait, seperti</p>	

			<p>pertama adalah mengidentifikasi tujuan kolaborasi dan hasil yang ingin dicapai. Ini melibatkan penentuan masalah yang akan diselesaikan atau proyek yang akan dilakukan bersama. Komunikasi awal antara kedua belah pihak diperlukan untuk memahami dengan jelas tujuan kolaborasi dan ekspektasi yang ada. Kedua Penentuan peran dan tanggung jawab: Setelah tujuan kolaborasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Terus yang ketiga penyusunan rencana kerja, Rencana kerja yang terperinci perlu disusun untuk menggambarkan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam</p>	<p>proyek yang akan dikerjakan bersama. Komunikasi awal tentang tujuan kolaborasi harus dimulai dengan identifikasi tujuan kolaborasi</p>	<p>kementerian, dinas, atau lembaga terkait di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota. Pihak masyarakat bisa meliputi organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, kelompok advokasi, atau komunitas terdampak. Pertemuan dan Diskusi, langkah selanjutnya adalah mengatur pertemuan atau diskusi yang melibatkan semua pihak terkait. Pertemuan ini bisa dilakukan dalam bentuk rapat formal, lokakarya, atau forum diskusi terbuka. Tujuan pertemuan ini adalah untuk saling bertukar informasi, berbagi pemahaman, serta membahas isu-isu yang relevan dengan upaya mengatasi kemiskinan</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>kolaborasi. Rencana ini harus mencakup jadwal, anggaran, sumber daya yang diperlukan, dan metrik evaluasi kinerja.</p> <p>Komunikasi yang terus-menerus dan terbuka diperlukan untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang rencana kerja ini. Keempat Komunikasi rutin, selama kolaborasi, komunikasi rutin antara kedua belah pihak sangat penting. Pertemuan secara teratur, baik melalui pertemuan tatap muka, konferensi telepon, atau melalui platform komunikasi online, diperlukan untuk memastikan saluran komunikasi terbuka dan informasi terkini dapat dibagikan dengan tepat waktu. Kelima Penanganan masalah, Dalam kolaborasi,</p>	
--	--	--	---	--

			<p>mungkin timbul masalah atau hambatan yang perlu ditangani. Komunikasi yang efektif diperlukan dalam mengidentifikasi, mengomunikasikan, dan mencari solusi untuk masalah tersebut. Pihak-pihak yang terlibat harus berkomunikasi secara proaktif untuk memecahkan masalah dengan cepat dan efisien. Dan terakhir itu Evaluasi dan umpan balik: Pada akhir kolaborasi, penting untuk melakukan evaluasi bersama dan memberikan umpan balik. Komunikasi yang terbuka dan jujur mengenai hasil kolaborasi, kesuksesan, dan area peningkatan akan membantu dalam menginformasikan kolaborasi di masa depan</p>		
		<p>Bagaimana hubungan kerja antara pihak</p>	<p>Kalau hubungan kerja antara sektor publik, sektor swasta, dan masyarakat</p>	<p>Jadi ini Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya di Indonesia</p>	<p>Badan Amil Zakat Nasional, juga dikenal sebagai BAZNAS, mengelola zakat, infak, sedekah,</p>

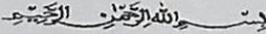
		<p>pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar</p>	<p>sipil sangat penting untuk memerangi kemiskinan di Kota Makassar. Jadi, tiga pihak ini itu bekerja sama dalam misalnya pemerintah membuat kebijakan dan program yang mendukung penanggulangan kemiskinan, seperti program pelatihan kerja, bantuan modal usaha, dan program pengentasan kemiskinan. Pemerintah juga dapat menyediakan infrastruktur dasar yang diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja, seperti akses ke listrik, air bersih, dan transportasi yang baik. Pemerintah juga dapat meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi menghasilkan lapangan kerja. Yah Selanjutnya, pihak swasta bisa bertanggung jawab untuk menciptakan</p>	<p>dikelola oleh BAZNAS. Jadi, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah dalam berbagai cara untuk memerangi kemiskinan di Kota Makassar dengan menekankan koordinasi dan sinergi. BAZNAS dan pemerintah Kota Makassar bekerja sama dan bekerja sama untuk memaksimalkan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kedua pihak berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama melalui diskusi, pertemuan, dan kerja sama dalam pelaksanaan program-program. Pendistribusian Zakat, BAZNAS mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat, termasuk zakat penghasilan, zakat fitrah, dan zakat mal. Pemerintah</p>	<p>dan dana sosial lainnya di Indonesia. Dalam beberapa cara, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk memerangi kemiskinan: Koordinasi dan Sinergi: BAZNAS dan pemerintah Kota Makassar bekerja sama dan bekerja sama untuk memaksimalkan upaya untuk mengatasi kemiskinan. Kedua belah pihak berbagi informasi dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sama. Ini dilakukan melalui percakapan, pertemuan, dan kolaborasi dalam menjalankan program. Pendistribusian Zakat: BAZNAS mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dari masyarakat, termasuk zakat penghasilan, zakat fitrah, dan zakat mal. Pemerintah Kota Makassar membantu mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat sosial seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha</p>
--	--	--	---	---	--

			pekerjaan	Kota Makassar membantu mendistribusikan zakat kepada penerima manfaat yang membutuhkan, seperti program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha	
	Apakah ada pertemuan rutin yang dilakukan dengan berbagai instansi lain dalam mengatasi kemiskinan di Kota Makassar?	Dalam upaya mengatasi kemiskinan di Kota Makassar seringkali terdapat pertemuan dan kolaborasi rutin antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan. Pemerintah kota biasanya memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertemuan tersebut. Mereka dapat mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan instansi terkait, seperti dinas sosial, dinas tenaga kerja, dan dinas pengembangan ekonomi. Pertemuan ini bertujuan untuk saling berbagi informasi, mengkoordinasikan program-program yang ada, dan merencanakan strategi yang holistik untuk mengatasi kemiskinan. Selain pertemuan		Bersama pihak yang kami ajak kerjasama tentu ada yang sebuah pertemuan yang diadakan. Tapi kalau dinsos tadi kan sudah saya bilang kalau kerja sama nya hanya dari segi data base yang dibutuhkan oleh BAZNAS. Seperti rapat ini penting untuk menyatukan persepsi dan membahas mengenai kerja sama yang terjalin. Bagaimana progresnya dan hal yang menjadi kekurangannya	Dalam beberapa cara, BAZNAS bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar untuk memerangi kemiskinan dengan senantiasa berkoordinasi melalui pertemuan atau rapat yang juga menjadi tempat evaluasi

			pemerintah, mungkin juga terdapat forum atau kelompok kerja yang melibatkan perwakilan dari sektor swasta, lembaga nirlaba, universitas, dan masyarakat sipil		
4	Masyarakat penerima bantuan	Apakah saudara menerima bantuan dari Dinas Sosial dan BAZNAS Kota Makassar?	jadi untuk bantuan dari dinas sosial itu ada yah, seperti bantuan program keluarga harapan, ada juga biasa bantuan untuk pendidikan seperti keperluan sekolah. Kemudian dari BAZNAS itu ada bantuan zakat yang diberikan kepada kami. Dinsos dan BAZNAS sejauh ini punya peran membantu kehidupan kami		
		Bagaimana pendapat anda tentang upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan?	kalau pemerintah itu selalu ji kasi bantuan tapi itu yah biasa bantuannya masih belum mencukupi. Sampai sekarang juga masih banyak masyarakat yang terlilis kemiskinan. Jadi kalau begitu ini pekerjaan yang harus pemerintah lakukan		
		Jika ada program yang dilaksanakan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, apakah program tersebut efektif?	iya ada bantuannya tapi seperti program keluarga harapan uangnya tidak cukup biyai sekeluarga yah. Paling kami gunakan untuk membeli bahan pokok. Tapi harus bersyukur juga karena ada bantuan. Cuman harus ada program yang lebih berdampak lagi kalau begini. Karena contoh kami ini tinggal di bali perumahan yang besar dengan keadaan seperti ini kalau begini tidak cocok dengan Makassar yang katanya kota besar. Jadi pemerintah itu harus kerja sama istilahnya kolaborasi missal BAZNAS dan dinsos ini bias kerja sama mengatasi kemiskinan di Kota Makassar		

Lampiran 6. Bukti Hasil Cek Plagiat


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**
Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588


SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Yuliana
 Nim : 105641112119
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 11 Agustus 2023
 Mengetahui
 Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


 Yuliana, NPM. 105641112119, M.I.P.
 NIM. 105641112119

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Yuliana 105641112119

ORIGINALITY REPORT

10 SIMILARITY INDEX **100%**

LULUS

0% INTERNET SOURCES 2% PUBLICATIONS 4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Maritim Raja Ali Haji Student Paper	3%
2	123dok.com Internet Source	3%
3	palembang.tribunnews.com Internet Source	2%
4	repository.umsu.ac.id Internet Source	2%
5	pusdiklatbkt.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II Yuliana 105641112119

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.upbatam.ac.id Internet Source	5%
2	www.scribd.com Internet Source	3%
3	jurnal.kpk.go.id Internet Source	2%
4	journal.ugm.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.umpo.ac.id Internet Source	2%
6	thejournalish.com Internet Source	2%
7	www.researchgate.net Internet Source	2%
8	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	2%
9	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	2%

BAB III Yuliana 105641112119

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

10% PUBLICATIONS

2% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 Yuli Astutik, Soebijantoro Soebijantoro. "Dampak Kunjungan Wisatawan Terhadap Pelestarian Museum Trinil Tahun 2010-2013", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2015
Publication 2%

2 ejurnal-stitpringsewu.ac.id
Internet Source 2%

3 Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur
Student Paper 2%

4 Priani Wina, Novi Triana Habsari. "PERAN PEREMPUAN DAYAK KANAYATN DALAM TRADISI UPACARA NAIK DANGO (STUDI DI DESA PADANG PIO KECAMATAN BANYUKE HULU KABUPATEN LANDAK KALIMANTAN BARAT)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2017
Publication 2%

5 Fatimah Assegaf. "Model Kepemimpinan Transformasional dan Kontribusinya terhadap

BAB IV Yuliana 105641112119

ORIGINALITY REPORT

6% SIMILARITY INDEX
0% PUBLICATIONS
3% STUDENT PAPERS

LULUS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Percentage
1	bahasa.makassarkota.go.id Internet Source	4%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

Exclude bibliography

On



BAB V Yuliana 105641112119

ORIGINALITY REPORT

5%



SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

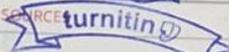
0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE



1

dokumen.tips
Internet Source

3%

2

repository.unhas.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2x

Exclude bibliography

On



RIWAYAT HIDUP



Yuliana, tempat tanggal lahir di Unra, 27 Juli 2001. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Hasanuddin dan Halimatan. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 42 Waetuo pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Awangpone dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA Ma'had Hadits Al-Junaidiyah Biru Bone dan selesai pada tahun 2019. Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Nomor Induk Mahasiswa 105641112119, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mengambil Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada tahun 2023 penulis mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dengan judul *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Kemiskinan Menuju SDGs 2030 di Kota Makassar. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan bahan referensi bagi pemerintah dalam mengatasi permasalahan global seperti kemiskinan. Semoga penulis dapat mengimplementasikan di masyarakat segala ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama menempuh pendidikan di Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.